

**SISTIM BAGI HASIL DAN DAMPAK MOTORISASI PEMANGKAPAN IKAN
TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DI KELURAHAN LAPPA
KABUPATEN SINJAI**

SKRIPSI

OLBB

ARMAN HAKIM



PERPL. ... HASANUDDIN	
Tgl. Terima	
Asal Dari	
Banyaknya	
Harga	
No. Inventaris	
No. Klas	

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1992

SISTIM BAGI HASIL DAN DAMPAK MOTORISASI PENANGKAPAN IKAN
TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DI KELURAHAN LAPPA
KABUPATEN SINJAI

SKRIPSI

Oleh
ARMAN HAKIM



FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1992

RINGKASAN

ARMAN HAKIM. Sistim Bagi Hasil dan Dampak Motorisasi Penangkapan Ikan Terhadap Pendapatan Nelayan di Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai. (Dibawa bimbingan H. M. Natsir Nessa sebagai Ketua, M. Yunus T dan Mardiana E. Fachry sebagai Anggota).

Penelitian menunjukkan bahwa motorisasi dan modernisasi perahu dan alat penangkapan ikan sudah cukup mengenai sasaran tujuan pembangunan perikanan laut, yaitu peningkatan pendapatan nelayan. Ada anggapan bahwa dengan adanya program motorisasi menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan antara pemilik modal (pongawa) dengan juragan laut dan sawinya.

Penelitian ini bertujuan mengkaji sistim bagi hasil dan dampak motorisasi penangkapan ikan terhadap pendapatan nelayan.

Metode penelitian ini adalah studi kasus dimana pengambilan sampel dilakukan secara Proportional Stratified Random Sampling. Dari 36 responden yang dijadikan sampel 18 responden (50,0%) adalah nelayan pemilik yang merangkap sebagai pelaksana penangkap ikan (pemilik sekaligus juragan laut), 2 responden (5,6%) sebagai pemilik/pongawa, 2 responden (5,6%) sebagai juragan laut dan 14 responden (38,8%) adalah buruh nelayan (sawi).

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan memakai daftar pertanyaan, sedangkan data sekunder

diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan ditabulasi, kemudian dianalisa secara deskriptif.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya pemakaian motor atau dengan semakin besarnya ukuran motor yang digunakan akan semakin tinggi pendapatan nelayan.
2. Alih teknologi dari tradisional ke teknologi baru (motorisasi) telah membawa berbagai perubahan pada pemakai teknologi tersebut. Perubahan tersebut meliputi nilai produksi, biaya produksi, pendapatan dan bagi hasil.
3. Penerimaan perturo unit usaha yang diamati adalah masing-masing Rp. 118.650,- untuk perahu tanpa motor, Rp. 174.613,- untuk perahu motor kecil (motor tempel), Rp.1.156.713,- untuk perahu motor sedang (< 30 PK) dan Rp.4.151.000,- untuk perahu motor besar (> 30 PK).
4. Secara relatif pendapatan masing-masing status nelayan meningkat dengan semakin meningkatnya ukuran motor penggerak.
5. Sistem bagi hasil di daerah penelitian dipengaruhi oleh kebiasaan setempat dengan perbandingan 1 : 1. Pihak pemilik/pongawa memperoleh 50% dan pihak penggarap memperoleh 50% dari hasil bersih.

SISTIM BAGI HASIL DAN DAMPAK MOTORISASI
PENANGKAPAN IKAN TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN
DI KELURAHAN LAPPa KABUPATEN SINJAI

Oleh

AIRMAN HAKIM

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada
Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin

JURUSAN SOSIAL EKONOMI
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1991

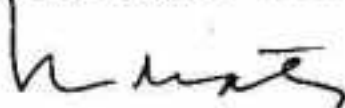
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil dan Dampak
Motorisasi Penangkapan Ikan
terhadap Pendapatan Nelayan
di Kelurahan Lappa, Kabupaten
Sinjai

Nama : Arman Hakim


Nomor Pokok : 85 06 161

Skripsi Telah Diperiksa

dan Disetujui oleh :



Prof. Dr. Ir. H. M. Natsir Nessa, MS
Pembimbing Utama

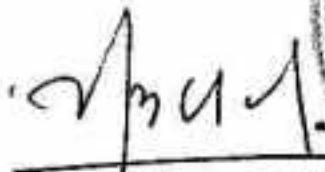


Ir. M. Yunus T
Pembimbing Anggota

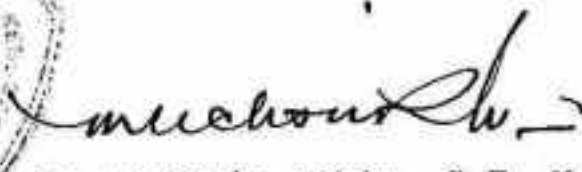


Ir. Mardiana E. Fachry
Pembimbing Anggota

Diketahui Oleh :



Dr. Ir. H. Abd. Rachman Laidding, M.Sc.
Jekan



Dr. Muchsin Rahim, S.E. M.Sc.
Ketua Jurusan

Tanggal Lulus : 4 - 9 - 1992

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan Anugrah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Ir. H. M. Natsir Nessa, MS, sebagai pembimbing utama, juga kepada Bapak Ir. M. Yunus T dan Ibu Ir. Mardiana E. Fachry, masing-masing sebagai pembimbing anggota yang ihlas meluangkan waktunya dan bersusah payah memberikan nasehat, petunjuk dan bimbingan kepada penulis sejak dari awal penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Kepada Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dosen dan pegawai yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan selama penulis mengikuti pendidikan, penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan peneliti didwan hanafi atas kerja sama yang baik dan segala bantuannya. Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu baik langsung maupun tidak langsung.

Secara khusus, kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, kakak dan adik tersayang, sahabatku Narsrullah, Noor Fajar Taufiq, Maemmah Effendy, dengan rasa syukur dan

terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas segala dorongan, pengorbanan dan pengertian selama penulis dalam pendidikan hingga selesai.

Akhir kata meskipun skripsi ini masih jauh dari sempurna namun penulis tetap mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kita semua, Amin.

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	5
Hipotesis	5
Tujuan dan Kegunaan	6
TINJAUAN PUSTAKA	7
METODE PENELITIAN	18
Daerah dan Waktu Penelitian	18
Materi dan Metode Penelitian	18
Analisa Data	19
KEADAAN UMUM WILAYAH	20
Letak dan Pembagian Administrasi Wilayah .	20
Keadaan Alam dan Potensi Wilayah	21
Keadaan Penduduk	22
- Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Umur	22
- Mata Pencaharian Penduduk	23
- Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Keadaan Perikanan	25
Prasarana dan Sarana Perikanan	26
- Sarana Armada Penangkapan Ikan ...	27
- Sarana Alat Penangkapan	28

Keadaan Peralatan dan Sarana Penunjang	29
- Sarana Penunjang Produksi Perikanan	29
- Sarana Perhubungan	30
HASIL DAN PEMBAHASAN	31
Keadaan Sosial Ekonomi Responden	31
- Tingkat Umur	31
- Tingkat Pendidikan	32
- Status Nelayan Responden	33
Pemilikan Perahu dan Pola Operasi Penangkapan Ikan	35
- Pemilikan Perahu dan Alat Tangkap ..	35
- Pola Operasi Penangkapan	37
Pola Usaha Penangkapan dan Hubungan Kerja ..	38
- Dentuk Usaha	38
- Hubungan Kerja Ponggawa dan Sawi ...	40
- Hubungan Kerja Ponggawa Ikan (Pappalele) dengan Ponggawa Perahu ..	40
Sistim Bagi Hasil	42
- Pole and Line	43
- Bagan Perahu	45
- Pancing Tonda	47
- Gae	48
Usaha Penangkapan Ikan dan Pendapatan Nelayan	49
- Pembiayaan	49
- Pendapatan Nelayan	51
KESIMPULAN DAN SARAN	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Rataan Struktur Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Ikan untuk Perahu Bertenaga Layar dan Perahu Bertenaga Motor Menggunakan Purse Seine di Kabupaten Batang	10
2.	Luas Penggunaan Lahan di Kelurahan Lappa, Kabupaten Sinjai	21
3.	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Lappa	22
4.	Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Kelurahan Lappa	23
5.	Tingkat Pendidikan Penduduk di Kelurahan Lappa	24
6.	Produksi Ikan di Kelurahan Lappa dan di Kabupaten Sinjai	25
7.	Jenis Armada Penangkapan Ikan di Kelurahan Lappa	27
8.	Perkembangan Alat Tangkap Ikan di Kelurahan Lappa	28
9.	Jumlah Sarana Penunjang Produksi Perikanan di Kelurahan Lappa	29
10.	Jumlah dan Jenis Sarana Perhubungan yang terdapat di Kelurahan Lappa	30
11.	Tingkat Umur Nelayan Responden Menurut Status di Kelurahan Lappa	32
12.	Tingkat Pendidikan Nelayan Responden Menurut Status di Kelurahan Lappa	33
13.	Status Nelayan Responden di Kelurahan Lappa .	34
14.	Distribusi Nelayan Responden Menurut Jenis/ Ukuran Motor Alat Penggerak di Kelurahan Lappa.	35

Teks

15.	Distribusi Nelayan Responden Menurut Jenis Alat Tangkap di Kelurahan Lappa	36
16.	Karakteristik Kerja Nelayan Responden Dalam Operasi Penangkapan Ikan di Kelurahan Lappa	39
17.	Rataan Struktur Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Ikan Perturo Berdasarkan Perahu/Ukuran Motor Penggerak	54
18.	Karakteristik Usaha Penangkapan Nelayan Berdasarkan Perahu/Ukuran Motor Penggerak yang Digunakan	55
19.	Pendapatan Nelayan Pemilik (Ponggawa), Juragan Laut dan Sawi Menurut Ukuran Motor Penggerak yang Digunakan	56

Lampiran

4.	Analisa Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Perahu Motor dengan Alat Tangkap Lanra	68
5.	Analisa Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan dengan Menggunakan Perahu Motor Tempel/Ukuran Motor Kecil dengan Alat Tangkap Lanra	70
6.	Analisa Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Bagan Perahu dengan Memakai Motor Penggerak	72
7.	Analisa Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Pancing Tonda dengan Memakai Motor Penggerak	75
8.	Analisa Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Gae dengan Memakai Motor Penggerak .	77
9.	Analisa Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Pole and Line dengan Memakai Motor Penggerak	79



Lampiran

Nomor	Halaman
10.	Rataan Struktur Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Ikan Menurut Perahu/Ukuran Motor Penggerak dan Alat Tangkap 80
11.	Rekapitulasi Investasi dan Biaya Usaha Penangkapan Ikan dengan Perahu Motor 81
12.	Rekapitulasi Investasi dan Biaya pada Usaha Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Perahu tidak Bermotor 83
13.	Nama-nama Responden Sawi (Buruh Nelayan) dengan Alat Tangkap yang Diikuti 84

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dipandang dari sudut geografis, wilayah Republik Indonesia terdiri dari ribuan pulau yaitu 13.667 buah pulau dan 12.736 buah diantaranya tidak dihuni oleh manusia. Dalam kawasan itu terbentang garis pantai yang sangat panjang sebagai tempat bertebaran desa-desa yang amat besar jumlahnya (Mattulada, 1982).

Luas wilayah Republik Indonesia 7,3 juta km² dimana 5,4 juta km² terdiri dari perairan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Republik Indonesia sangat potensial sebagai daerah perikanan, karena luas perairan jauh lebih besar dibanding dengan luas daratan (Hutabarat, 1984).

Dengan perairan yang demikian luas tersebut terdapat berbagai kekayaan dan potensi sumber daya alam lautan yang terkandung di dalamnya. Maka diharapkan salah satu sasaran yang hendak dicapai oleh pembangunan nasional adalah suatu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada pendayagunaan sumber daya alam (tanah dan air) dan tenaga manusia sehingga menghasilkan produksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (Kasryno, 1984).

Meskipun sumber daya laut yang kita miliki begitu besar dan mempunyai kedudukan ekonomi yang potensial dan sangat penting, namun nelayan Indonesia yang memanfaatkan sumber daya tersebut masih termasuk kelompok . . .

masyarakat yang tingkat penghasilannya tergolong rendah.

Menurut Adisasmita (1978) dalam Abdullah (1986), bahwa untuk melihat kedudukan teknik, sosial dan ekonomi nelayan yang begitu lemah, perikanan rakyat akan dikembangkan melalui :

- a. Peningkatan dalam rehabilitasi dan pembangunan prasarana produksi dan prasarana hasil-hasil perikanan.
- b. Peningkatan kegiatan penyuluhan dan penelitian.
- c. Peningkatan penyediaan kredit dan sarana produksi yang lain dengan persyaratan yang wajar bagi nelayan
- d. Peningkatan pengembangan koperasi perikanan.

Dengan bantuan fasilitas yang diupayakan oleh pemerintah diharapkan nantinya sistim ini selain dapat meningkatkan pendapatan nelayan secara berencana, juga dapat memenuhi kebutuhan protein hewani pada masyarakat, karena kekurangan protein tersebut nampaknya belum dapat dipenuhi oleh sumber daya protein asal hewan ternak.

Dalam pendayagunaan laut sebagai sumber hayati dalam rangka meningkatkan peranan atau sumbangan laut dalam pembangunan, maka seyogyanya teknologi yang tepat dan serasi harus dikaitkan dengan usaha dan ikhtiar untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya hayati laut (Abdullah, 1986).

Menurut Sudartha (1982) teknologi merupakan alat dan cara yang digunakan dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan guna kepentingan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna. Kehadirannya mewujudkan dalam

berbagai bentuk, jenis dan sifatnya yang beraneka ragam, semuanya ditentukan oleh bidang penerapannya serta tingkat kemampuan yang dimiliki oleh pemakai teknologi. Misalnya teknologi dibidang perikanan diharapkan menimbulkan perubahan dalam hal :

- a. Teknis operasional usaha perikanan
- b. Meningkatkan produktifitas dan penghasilan
- c. Orientasi nilai budaya masyarakat dan interaksinya dengan alam yang ditaati dengan mudahnya upacara yang biasa dilakukan oleh penangkap ikan.

Penerapan teknologi diutamakan pada cara-cara yang terjangkau oleh nelayan kecil, baik dalam persyaratan, keterampilan maupun biaya, dan diusahakan agar lebih menjamin kontinuitas usaha serta stabilitas pendapatan tanpa mengganggu spesialisasi usaha yang telah cukup menguntungkan (Husain, 1983).

Dalam pola dasar Pembangunan Sulawesi Selatan disebutkan bahwa titik berat pembangunan daerah dalam jangka panjang adalah pembangunan dibidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mempercepat tercapainya struktur ekonomi nasional yang seimbang antara sektor pertanian dengan sektor lainnya. Oleh karena itu pembangunan disektor pertanian sangat diperlukan utamanya dalam rangka menunjang sektor industri (Anonim, 1984).

Untuk mencapai sasaran tersebut disektor perikanan telah dilakukan usaha-usaha dalam meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan sebagai satu-satunya sasaran



yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan di samping untuk meningkatkan peranan sub sektor perikanan sebagai penghasil devisa negara. Untuk itu pengembangan teknologi perikanan dan penerapannya sangat memegang peranan penting.

Dalam merealisasikan program pembangunan tersebut, berbagai bentuk kebijaksanaan telah ditempuh pemerintah. Salah satu diantaranya adalah kebijaksanaan motorisasi perahu. Motorisasi perahu nelayan yang merupakan usaha modernisasi diharapkan dapat meningkatkan ataupun memberikan hasil yang optimal. Dalam hal ini bukan hanya kenaikan produksi akan tetapi juga kenaikan pendapatan nelayan (Syukur, 1987).

Disadari bahwa perkembangan motorisasi perahu dan modernisasi alat penangkapan pada dasarnya telah meningkatkan pendapatan nelayan. Namun sistem bagi hasil yang diterapkan cenderung lebih dinikmati oleh golongan tertentu sebagai pemilik modal akibatnya tidak berimbang pendapatan antara pemilik dan buruh nelayan.

Sistem bagi hasil dalam usaha perikanan laut harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap (sawi), hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usahanya sesuai dengan jasa yang diberikannya (Undang-Undang Perikanan No. 16/1964).

Dikalangan masyarakat nelayan terdapat sejenis kelompok sosial yang disebut kelompok sosial Ponggawa-Sawi

yang terdiri dari ponggawa sebagai pimpinan dan warganya sebagai anak buah atau disebut sawi (Sallatang, 1981).

Yang pertama merasakan adanya pergeseran tugas dan pengalokasian tenaga kerja atas perubahan-perubahan teknologi perikanan tersebut adalah orang-orang yang terlibat dalam kelompok sosial itu.

Dari persoalan-persoalan tersebut di atas mengundang pertanyaan untuk diteliti bahwa sejauh mana dampak motorisasi penangkapan ikan terhadap sistem bagi hasil dan pendapatan nelayan.

Perumusan Masalah

Penelitian telah menunjukkan bahwa motorisasi dan modernisasi perahu dan alat penangkapan sudah cukup mengenai sasaran tujuan pembangunan perikanan laut, yaitu peningkatan pendapatan nelayan (Syukur, 1987).

Permasalahan yang muncul kemudian adalah :

- Apakah dengan program motorisasi akan mempengaruhi sistem bagi hasil yang berlaku ?
- Seberapa besar bagian pendapatan yang diterima oleh nelayan ponggawa/pemilik, juragan laut dan sawi yang memakai perahu dan perahu motor ?

Hipotesis

Dari uraian masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut :

- Motorisasi akan mempengaruhi sistem bagi hasil yang berlaku.

- Motorisasi akan meningkatkan pendapatan nelayan baik pemilik, juragan laut maupun sawi.

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem bagi hasil dan dampak motorisasi penangkapan ikan terhadap pendapatan nelayan dan untuk mengetahui besarnya pendapatan tiap golongan nelayan.

Sedangkan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai langkah pengetahuan dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan perikanan dan pemerataan pendapatan masyarakat nelayan.

FINJAUAN PUSTAKA

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan perikanan adalah untuk meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan sebagai satu-satunya sasaran yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan, disamping untuk meningkatkan sub sektor perikanan sebagai penghasil devisa negara (Anonymous, 1985 dalam Rehang, 1991).

Untuk mencapai sasaran tersebut, pengembangan teknologi perikanan dan penerapannya memegang arti penting. Penerapan teknologi diutamakan pada cara-cara yang terjangkau oleh nelayan kecil, baik dalam persyaratan keterampilan maupun biaya yang diusahakan untuk lebih menjamin kontinuitas usaha serta stabilitas pendapatan tanpa mengganggu spesialisasi untuk yang telah cukup menguntungkan (Husain, 1983).

Selanjutnya kebijaksanaan operasi pembangunan perikanan dalam pengembangan produksi. Dimana diantaranya adalah meningkatkan produktifitas usaha penangkapan ikan di laut melalui modernisasi bertahap dan diversifikasi usaha yang telah ada terutama sekali ditujukan kepada usaha motorisasi perahu layar, modernisasi alat penangkapan dari bahan serat alam menjadi serat sintetis, perubahan jenis alat tangkap ke arah yang lebih produktif dengan memakai alat tangkap tambahan disamping alat

tangkap utama (Anonymous, 1981 dalam Laonta, 1986).

Menurut Adisasmita (1978) dalam usaha intensifikasi produksi perikanan laut akan diusahakan kegiatan-kegiatan motorisasi perahu nelayan yang ada, secara selektif. Untuk melaksanakan motorisasi perahu ini diperlukan penyediaan kredit dengan persyaratan yang lunak. Sedangkan dalam hal ekstensifikasi produksi perikanan laut diusahakan dengan menambah unit-unit kapal motor kecil. Agar memungkinkan tercapainya daya guna yang setinggi-tingginya dari penggunaan kapal kecil ini, rehabilitasi dan pembangunan pelabuhan perikanan yang tersebar lokasinya perlu dilaksanakan.

Menurut Sempang, Mulyadi dan Syarifuddin (1983) bahwa untuk membebaskan dari ketergantungan musim, maka diperlukan suatu modifikasi teknologi tradisional menuju teknologi modern. Sarana yang terdekat untuk memodernisasi hal tersebut adalah penggunaan mesin bantu sebagai alat penggerak yang lazim disebut modernisasi.

Motorisasi adalah merupakan suatu usaha pengeksplo-tasian sumber daya laut dengan mengoperasikan alat penangkapan yang digerakkan dengan perahu motor mulai dari ukuran kecil berupa motor tempel sampai kapal motor ukuran besar (Laonta, 1986).

Masuknya teknologi di sektor perikanan khususnya motorisasi telah membawa berbagai perubahan pada pemakai teknologi tersebut. Penggunaan teknologi semacam ini merupakan suatu kegiatan yang disengaja dan direncanakan

baik oleh nelayan itu sendiri maupun oleh lembaga resmi yang terutama ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan (Sudharto, 1982). Selanjutnya dikatakan, penerapan motorisasi menyebabkan perubahan teknis organisasi penangkapan. Perubahan-perubahan itu meliputi jangkauan, perubahan lama perjalanan dan penangkapan serta perubahan pada frekwensi penangkapan.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan motor dalam usaha perikanan tangkap telah berhasil meningkatkan pendapatan nelayan. Untuk kasus nelayan kecil di Jawa, Manurung (1983) menyatakan bahwa secara umum ada kecenderungan semakin besar daya gerak perahu yang digunakan semakin besar pendapatan nelayan, baik juragan darat, juragan laut maupun pandega (sawi).

Sementara itu Sinaga, Colter dan Saleh (1982) mengungkapkan hal yang senada untuk kasus penelitian di DKI Cirebon, Cilacap dan Muncar, bahwa semakin tinggi PK motor yang digunakan semakin tinggi pula pendapatan perkapita keluarga nelayan yang menggunakannya di keempat daerah penelitian tersebut.

Librero dan Collier (1979) dalam Mappangaja (1981) menunjukkan kasus struktur biaya dan penerimaan dari usaha penangkapan ikan yang menggunakan unit alat tangkap tradisional dan unit motorisasi serta kombinasi keduanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Rataan Struktur Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Ikan untuk Perahu Bertenaga Layar dan Perahu bertenaga Motor Menggunakan Purse Seine di Kabupaten Batang, 1974.

Item	Tenaga Layar Tradisional.	Tenaga Motor	
		A. T. Trad.	A. T. P. Seine
Jumlah Pendega (orang) Termasuk Nakoda	7	22	31
Biaya/ongkos Pendega (Rp/bulan)	10.810	196.720	923.330
Biaya Eksploitasi (Rp/bulan)	1.330	300.000	450.000
Pajak Penjualan/Retribusi (Rp/bulan)	880	36.700	146.260
Jumlah Biaya Penangkapan (Rp/bulan)	13.020	535.420	1.519.590
Nilai Hasil Tangkapan (Rp/bulan)	17.660	734.120	2.925.170
Penerimaan Pemilik/Juragan (Rp/bulan)	4.640	198.720	1.405.580
Rataan Upah Pendega Pendega/hari (Rp/orang/hari)	50	220	710

Sumber : A. Rahman Mappangaja. 1981

Terlihat bahwa nilai hasil tangkapan, biaya dan pendapatan perorang pendega terbesar pada unit penangkapan Purse Seine, disusul oleh unit penangkapan tradisional yang menggunakan perahu dengan tenaga penggerak mesin dan yang terkecil diberikan oleh unit penangkapan tradisional yang bertenaga layar.

Smith (1973) dalam Mappangaja (1981) mengemukakan bahwa rendahnya tingkat pendapatan nelayan tradisional berkait dengan beberapa faktor yaitu :

- a. Terbatasnya sumber daya perikanan
- b. Unit penangkapan yang masih sederhana baik jenis maupun ukurannya
- c. Lemahnya kekuatan pasar
- d. Pengaruh inflasi

Dijelaskan bahwa masalah tersebut di atas dapat dihindari dengan meningkatkan pendapatan dari usaha penangkapan ikan, yaitu melalui usaha memperbesar jumlah tangkapan, meningkatkan harga atau memperkecil ongkos. Usaha lainnya berupa tambahan pendapatan dari luar usaha penangkapan itu.

Menurut Agustinus (1991) pengembangan teknologi di sektor perikanan laut pada dasarnya telah meningkatkan produktifitas namun demikian bagi hasil yang tidak seimbang di antara pemilik modal dan buruh nelayan yang mengakibatkan peningkatan tersebut hanya dapat dinikmati oleh kelompok minoritas yang cenderung bukan nelayan penggarap.

Apa yang dikemukakan di atas sejalan pula hasil penelitian Manurung (1983) bahwa terlihat perbedaan yang cukup besar antara nelayan juragan dengan pendega. Sebagian besar golongan pendega (sawi) berada di bawah garis kemiskinan sedangkan juragan (pongawa) sebaliknya berada di atas garis kemiskinan.

Smith (1973) dalam Mappangaja (1981) mengemukakan bahwa rendahnya tingkat pendapatan nelayan tradisional berkait dengan beberapa faktor yaitu :

- a. Terbatasnya sumber daya perikanan
- b. Unit penangkapan yang masih sederhana baik jenis maupun ukurannya
- c. Lemahnya kekuatan pasar
- d. Pengaruh inflasi

Dijelaskan bahwa masalah tersebut di atas dapat dihindari dengan meningkatkan pendapatan dari usaha penangkapan ikan, yaitu melalui usaha memperbesar jumlah tangkapan, meningkatkan harga atau memperkecil ongkos. Usaha lainnya berupa tambahan pendapatan dari luar usaha penangkapan itu.

Menurut Agustinus (1991) pengembangan teknologi di sektor perikanan laut pada dasarnya telah meningkatkan produktifitas namun demikian bagi hasil yang tidak seimbang di antara pemilik modal dan buruh nelayan yang mengakibatkan peningkatan tersebut hanya dapat dinikmati oleh kelompok minoritas yang cenderung bukan nelayan penggarap.


Apa yang dikemukakan di atas sejalan pula hasil penelitian Manurung (1983) bahwa terlihat perbedaan yang cukup besar antara nelayan juragan dengan pendega. Sebagian besar golongan pendega (sawi) berada di bawah garis kemiskinan sedangkan juragan (pongawa) sebaliknya berada di atas garis kemiskinan.



Emmerson (1979) dalam Susilowati (1983) dalam pengamatannya di desa-desa pantai Jawa menyatakan bahwa semakin besar unit usaha ternyata menunjukkan gejala penurunan bagi hasil bersih yang diterima nelayan buruh.

Menurut Mappangaja (1981) struktur masyarakat nelayan dilihat dari segi keadaan (taraf) kehidupan, khususnya tingkat pendapatan, dalam garis besarnya terdiri dari dua lapisan. Lapisan pertama adalah para ponggawa yaitu pemilik modal (unit penangkapan) itu merupakan lapisan atas. Lapisan kedua adalah para nelayan sawi, sebagai buruh menyumbangkan tenaga dan keterampilan mereka dalam usaha penangkapan ikan, mereka ini merupakan lapisan bawah dalam masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa antara ponggawa dan sawi merupakan suatu kelompok sosial ekonomi yang terbentuk secara mandiri. Antara kedua pihak, bukan saja merupakan satu-kesatuan kerja (unit of working) melainkan juga merupakan kedatuan kehidupan (unit of living).

Susilowati (1983) menyatakan bahwa, ciri utama dari kelompok nelayan buruh adalah mereka mengabdikan dirinya kepada orang-orang yang dilayaninya, yaitu kelompok nelayan pemilik. Konsekwensi dari sikap mengabdinya itu adalah bahwa nelayan buruh bukanlah merupakan orang-orang bebas didalam melakukan pekerjaannya karena ia berada pada posisi yang lebih rendah. Mereka memperoleh penghasilan atas dasar bagi hasil bersih untuk tiap jenis usaha berbeda-beda.



Emmerson (1979) dalam Susilowati (1983) dalam pengamatannya di desa-desa pantai Jawa menyatakan bahwa semakin besar unit usaha ternyata menunjukkan gejala penurunan bagi hasil bersih yang diterima nelayan buruh.

Menurut Mappangaja (1981) struktur masyarakat nelayan dilihat dari segi keadaan (taraf) kehidupan, khususnya tingkat pendapatan, dalam garis besarnya terdiri dari dua lapisan. Lapisan pertama adalah para ponggawa yaitu pemilik modal (unit penangkapan) itu merupakan lapisan atas. Lapisan kedua adalah para nelayan sawi, sebagai buruh menyumbangkan tenaga dan keterampilan mereka dalam usaha penangkapan ikan, mereka ini merupakan lapisan bawah dalam masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa antara ponggawa dan sawi merupakan suatu kelompok sosial ekonomi yang terbentuk secara mandiri. Antara kedua pihak, bukan saja merupakan satu-kesatuan kerja (unit of working) melainkan juga merupakan kesatuan kehidupan (unit of living).

Susilowati (1983) menyatakan bahwa, ciri utama dari kelompok nelayan buruh adalah mereka mengabdikan dirinya kepada orang-orang yang dilayaninya, yaitu kelompok nelayan pemilik. Konsekwensi dari sikap mengabdinya itu adalah bahwa nelayan buruh bukanlah merupakan orang-orang bebas didalam melakukan pekerjaannya karena ia berada pada posisi yang lebih rendah. Mereka memperoleh penghasilan atas dasar bagi hasil bersih untuk tiap jenis usaha berbeda-beda.

Dalam hal penangkapan ikan, para nelayan hidup berkelompok bermodalkan pengalaman sedangkan sarana yang mereka pakai berupa perahu motor, jaring, lampu dan beberapa sarana pendukung lainnya, umumnya dimiliki oleh ponggawa lombo. Ponggawa lombo memegang kendali fungsional dari pada nelayan, karena ia berpengaruh besar di sektor permodalan, maka sudah jelas nelayan setempat mudah terorganisir. Hubungan kerja antara ponggawa dan sawi itulah yang membentuk sistim modal nelayan yang melibatkan warga masyarakat dan kelompoknya. Karena itu sesuai dengan sistim sosial tersebut, maka ponggawa lombo mempunyai kedudukan terpondang karena peranannya (Nurland, 1985).

Pola hubungan ponggawa-sawi adalah hubungan kerja antara ponggawa dan sawi di dalam organisasi kerja nelayan yang pada hakekatnya bersifat temporer (sementara) karena sawi sebenarnya adalah orang yang bebas dalam mengadu untung dalam trip-trip tertentu. Tetapi pada kenyataannya hubungan kerja mereka cenderung menjadi permanen sifatnya, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong terjadinya keadaan itu. Faktor-faktor tersebut antara lain karena selama sawi itu bekerja pada ponggawa (juragan), maka ponggawa tersebut berkewajiban membantu menanggung kebutuhan-kebutuhan keluarga buruh (sawi) apabila keluarga sawi mendapat kesusahan, walaupun kewajiban membantu tersebut bersifat sukarela ataupun bersifat hutang-piutang, hal inilah

yang membuat sawi terikat dengan ponggawa pemilik karena adanya hutang-piutang walaupun pada kenyataannya hutang tersebut tidak pernah terbayar. Disinilah timbul perasaan balas budi kepada ponggawa atas jasa-jasanya.

Sallatang (1981) menyatakan bahwa hubungan kerja produksi didasarkan pada saling percaya dan tanpa ikatan yuridis formal, namun ponggawa darat bisa juga melakukan pencatatan sederhana terutama menyangkut piutang.

Hutang-piutang itu dilakukan tanpa ada perjanjian formal ataupun tanpa menggunakan kwitansi. Masing-masing pihak hanya membuat catatan kecil. Hutang para sawi yang akan dilunasi pemotongannya tidak mutlak harus dilakukan tiap bulan ataupun pada setiap pembagian hasil.

Selanjutnya mengenai bagi hasil pada nelayan oleh Nurland (1985) dikatakan bahwa bagi hasil pada nelayan hampir sama dengan yang berlaku secara umum di Sulawesi Selatan. Dalam hal servis ia menjalin hubungan anak bapak. Ia memandang para sawinya bukan semata-mata dalam hubungannya patron-client, melainkan dijalin hubungan untuk memupuk dan memelihara modal dan kekayaan yang ada.

Hadirnya teknologi baru ditengah masyarakat nelayan apakah diterima atau tidak, setidaknya akan memberikan perubahan-perubahan pada masyarakat tersebut. Selanjutnya Mubyarto (1979) menyatakan bahawa sesuatu yang membawa serta perubahan dan sesudah perubahan itu, keadaan menjadi berubah dengan sebelumnya. Akibatnya timbul

adanya pihak yang untung tetapi pada pihak yang sama ada pihak yang lain dirugikan.

Menurut Mubyarto (1984) strata sosial yang mungkin terjadi dalam masyarakat nelayan berdasarkan tingkat pendapatan mereka adalah :

- a. Nelayan kaya A yang mempunyai kapal (juragan) sehingga mempekerjakan nelayan lain sebagai pendega tanpa ia sendiri harus ikut bekerja
- b. Nelayan kaya B yang memiliki kapal tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal
- c. Nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan dan memiliki perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga
- d. Nelayan miskin yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan bekerja lain baik untuk ia sendiri atau untuk istri dan anak-anaknya.
- e. Nelayan pendega atau tukang kiteng

Walaupun demikian dalam sistim bagi hasil perikanan strata sosial yang dapat ditemukan adalah juragan darat, yaitu nelayan yang memiliki modal dan alat tangkap; Juragan laut, yaitu nelayan yang bertindak sebagai pimpinan dalam operasi penangkapan; Dan sawi yaitu nelayan penggarap yang hanya memiliki modal berupa tenaga kerja dan keterampilan tertentu.

Bagi seorang pendega, adanya kesempatan dapat bekerja pada unit penangkapan yang lebih maju (motorisasi dan alat tangkap yang lebih baik) merupakan peluang dapat memperoleh pendapatan lebih besar. Sedangkan bagi seorang juragan (nelayan pengusaha), penggunaan alat penangkapan yang lebih maju, membutuhkan adanya investasi tambahan. Berapa besar tambahan keuntungan yang dapat diperolehnya, tentunya akan merupakan dasar pemikiran bagi pengambilan keputusan (Mappangaja, 1981).

Besarnya bagian yang menjadi milik bagi juragan dan pendega diatur berdasarkan bagi hasil yang disepakati bersama. Sistem bagi hasil tersebut dapat sesuai dengan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan yang ditetapkan pemerintah (UU. NO. 16 thn. 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan) atau menurut kebiasaan setempat.

Dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP) disebutkan antara lain sebagai berikut :

Pasal 3

1. - Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :
 - a. Jika dipergunakan perahu layar minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih.
 - b. Jika dipergunakan kapal motor minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.
2. Perikanan darat :

Pasal 4

Angka bagian nelayan pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut :

1. Perikanan laut :
 - a. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap, ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi dan pembangunan kapal/perahu, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lain;
 - b. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik, ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal, serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain-lainnya.
2. Perikanan darat :

METODE PENELITIAN

Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, yang umumnya masyarakat di Kelurahan ini adalah sebagai nelayan.

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dua bulan mulai dari bulan April sampai Juni 1991.

Materi dan Metode Penelitian

Materi penelitian ini adalah merupakan pengambilan data. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (questioner). Untuk data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus (studi kasus), dimana pengambilan sampel dilakukan secara Proportional Stratified Random Sampling yaitu sampel dipilih secara acak kemudian masing-masing diproporsikan berdasarkan tingkatan atau status nelayan yang dimiliki.

Dari sejumlah 36 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, 18 responden (50,0%) adalah nelayan pemilik yang merangkap sebagai pelaksana penangkap

ikan, 2 responden (5,6%) nelayan pemilik, 2 responden (5,6%) juragan laut dan 14 responden (38,6%) adalah sawi atau buruh nelayan.

Analisa Data

Data dan informasi yang telah diperoleh (data primer) ditabulasi dan selanjutnya dianalisa secara deskriptif. Untuk melihat pengaruh motorisasi terhadap distribusi pendapatan nelayan, maka dikelompokkan nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor dengan masing-masing alat tangkap yang digunakan yaitu :

- Perahu tanpa motor dengan alat tangkap lanra'.
- Perahu motor tempel dengan alat tangkap lanra'.
- Perahu motor sedang (<30 PK) dengan alat tangkap Gae, Bagan Perahu dan Pancing tonda.
- Perahu motor besar (>30 PK) dengan alat tangkap Pole an^s Line (Huhate).

Untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh, yaitu dengan menghitung selisih antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan formulasi seperti yang dikemukakan oleh Patong (1986) sebagai berikut :

$$P = P_i - B_t$$

Dimana :

- P = Pendapatan (Rp)
- P_i = Penerimaan yang diperoleh (Rp)
- B_t = Biaya-biaya dalam suatu operasi penangkapan ikan (Rp)

KEADAAN UMUM WILAYAH

Letak dan Pembagian Administrasi Wilayah

Kelurahan Lappa merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Kelurahan ini berjawa 2 km dari ibu kota kecamatan dan 3 km dari ibu kota kabupaten.

Secara administrasi dari kelurahan ini berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bone
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sinjai Timur dan
- Sebelah Barat : Kabupaten Bone, Kelurahan Balannipa.

Sedangkan kelurahan Lappa ini terbagi atas 5 lingkungan yaitu :

- Lingkungan Baru
- Lingkungan Kokoe
- Lingkungan Lengkong
- Lingkungan Lappa
- Lingkungan Bunging Tanre

Keadaan topografi kelurahan Lappa, umumnya terdiri dari dataran rendah dan sebagian wilayah berada pada daerah pantai dimana ketinggian dari permukaan laut sekitar 6 meter. Untuk lebih jelasnya keadaan wilayah kelurahan Lappa dapat dilihat pada lampiran 1.



Keadaan Alam dan Potensi Wilayah

Luas penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Luas Penggunaan Lahan di Kelurahan Lappa, Kabupaten Sinjai.

Pola Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Sawah	12,00	3,04
Pekarangan	36,00	9,11
Perkebunan	11,00	2,78
Rawa-rawa	7,50	1,90
Kolam/Tambak	283,00	71,65
Hutan Bakau	21,70	5,49
Lain-lain	23,80	6,03

Sumber : Kantor Kelurahan Lappa, 1991

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa penggunaan lahan yang terbesar adalah kolam/tambak 71,65%, disusul oleh tanah pekarangan 9,11%, sawah 3,04%, perkebunan 2,78%, rawa-rawa 1,90%. Sedangkan lahan untuk hutan bakau 5,49% dan 6,03% adalah penggunaan lahan yang berupa jalanan dan lain-lain.

Produksi hasil pertanian di kelurahan Lappa yang memberikan pendapatan yang terbesar adalah dari hasil perikanan laut. Dimana penghasilan utama penduduk di kelurahan Lappa adalah dari sektor perikanan laut.

Kedadaan Penduduk

a. Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Umur

Penduduk Kelurahan Lappa berjumlah 7471 jiwa, yang terdiri dari 3528 jiwa laki-laki dan 3943 jiwa wanita, dalam 1420 rumah tangga penduduk (RTP). Yang tergolong dalam berbagai tingkat umur. Beberapa kriteria penduduk dapat dibedakan atas 2 golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Berusia kerja berumur antara 15 - 45 tahun dan bukan usia kerja berumur antara 0 - 15 tahun serta berumur di atas 55 tahun (Said, 1982) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Lappa.

U M U R	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
0 - 4	448	454	902
5 - 9	538	528	1065
10 - 14	455	502	957
15 - 19	407	416	823
20 - 24	312	312	624
25 - 29	211	345	556
30 - 34	262	321	583
35 - 39	219	255	474
40 - 44	192	192	384
45 - 49	131	151	282
50 - 54	114	129	243
55 - 59	77	107	184
60 - 64	65	107	172
65	97	124	221
JUMLAH	3528	3943	7471

Sumber : Kantor Kecamatan Sinjai Utara, 1991

Pada tabel 2 di atas, terlihat bahwa setiap tingkat-an umur mempunyai jumlah penduduk yang berbeda dimana semakin tinggi umur jumlah penduduk makin kecil, seperti pada umur usia kerja 15 - 19 tahun (823 jiwa), 20 - 24 tahun (624 jiwa), 25 - 29 tahun (556 jiwa), 30 - 34 tahun (583 jiwa), 35 - 39 tahun (474 jiwa) dan 40 - 44 tahun (384 jiwa).

b. Mata Pencapaian Penduduk

Pada umumnya desa/kelurahan yang berada di pesisir pantai kebanyakan penduduknya bekerja sebagai nelayan. Demikian pula halnya di Kelurahan Lappa, namun masih terdapat penduduk yang mempunyai mata pencapaian selain nelayan. Untuk melihat keadaan mata pencapaian penduduk Kelurahan Lappa dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian di Kelurahan Lappa.

No	Mata Pencapaian	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	N e l a y a n	907	65,63
2.	P e t a n i	35	2,53
3.	P e d a g a n g	335	24,24
4.	B u r u h	17	1,23
5.	Pegawai/ABRI	6	0,43
6.	J a s a	45	3,26
7.	Industri	6	0,43
8.	Angkutan	28	2,03
9.	Peternakan	3	0,22

Sumber : Kantor Kelurahan Lappa, 1991

Pada tabel 4 di atas, terlihat bahwa mata pencaharian sebagai nelayan 907 jiwa (65,63%), petani 35 jiwa (2,53%), pedagang 335 jiwa (24,24%), jasa 45 jiwa (3,26%) buruh 17 jiwa (1,23%), pegawai/ABRI 6 jiwa (0,43%), industri 6 jiwa (0,43%), angkutan 28 jiwa (2,03%) serta peternakan 3 jiwa (0,22%). Mata pencaharian penduduk yang terbesar adalah nelayan yang meliputi 65,63% dan yang terkecil adalah peternakan 0,22%.

c. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk sangat berpengaruh terhadap adopsi inovasi mengenai teknologi, baik mengenai teknologi penangkapan, motorisasi perikanan, manajemen produksi dan lain-lain. Penduduk yang berpendidikan akan cepat dan aktif mencari hal-hal baru. Untuk melihat tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk di Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa	Persentase
1.	Tidak pernah sekolah	3944	54,78
2.	Tidak tamat SD	1978	27,48
3.	Tamat SD	805	11,18
4.	Tamat SLP	283	3,93
5.	Tamat SLA	180	2,50
6.	Tamat Perguruan Tinggi	9	0,13

Sumber : Kantor Kecamatan Sinjai Utara, 1991

Pada tabel 5 tersebut di atas terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan persentase jumlah penduduk yang mengecap pendidikan semakin kecil. Dimana penduduk yang tidak pernah sekolah, termasuk balita adalah 3944 jiwa (54,78%), tidak tamat SD 1978 jiwa (27,48%), tamat SD 805 jiwa (11,18%), tamat SLP 283 jiwa (3,93%), tamat SLA 180 jiwa (2,50%) dan tamat Perguruan Tinggi 9 jiwa (0,13%).

Keadaan Perikanan

Kelurahan Lappa merupakan daerah penghasil ikan yang terdapat di Kabupaten Sinjai, dan Kelurahan ini merupakan sentra produksi ikan di Kabupaten Sinjai. Untuk melihat produksi ikan di Kelurahan Lappa dan Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Produksi Ikan di Kelurahan Lappa dan di Kabupaten Sinjai.

T A H U N	Produksi (ton)	
	Kelurahan Lappa	Kabupaten Sinjai
1986	2.286,3	14.674,4
1987	2.678,6	15.976,6
1988	3.003,3	16.611,5
1989	2.717,5	15.499,1
1990	2.998,0	15.917,2

Sumber : Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, 1991

Pada tabel 6 tersebut di atas terlihat bahwa produksi ikan mengalami kenaikan lima tahun terakhir ini. Selanjutnya dengan melihat potensi yang ada di Teluk Bone dimana potensi sumber daya pertahun sekitar 168,780 ton. Maka potensi ikan di Kelurahan Lappa mempunyai peluang yang cukup besar jika sumber daya tersebut dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian pendapatan nelayanpun diharapkan akan meningkat, dimana dengan meningkatnya produksi ikan akan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Nelayan-nelayan yang telah menangkap ikan di laut dibawa ke tempat pelelangan ikan (TPI) yang terdapat di Kelurahan Lappa, untuk selanjutnya produksi ikan tersebut didistribusikan ke daerah-daerah di wilayah Kabupaten Sinjai, bahkan didistribusikan ke luar daerah seperti Bone, Sengkang dan Bulukumba.

Sarana dan Prasarana Perikanan

Dalam rangka pengembangan perikanan utamanya peningkatan produksi, maka sarana dan prasarana perikananpun sangat menentukan usaha pengembangan perikanan yang diharapkan.

Didalam meningkatkan produksi hasil perikanan terdapat 2 sarana produksi yang saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Kedua sarana tersebut yaitu armada penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan.

a. Sarana Armada Penangkapan

Sarana armada penangkapan itu adalah perahu/kapal, baik yang memakai motor ataupun yang tanpa motor sangat menunjang dalam bidang perikanan. Dan yang paling memegang peranan penting dalam penangkapan adalah faktor manusianya atau dengan kata lain faktor nelayan itu sendiri

Jumlah armada penangkapan ikan yang dioperasikan oleh nelayan di Kelurahan Lappa, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Jenis Armada Penangkapan Ikan di Kelurahan Lappa, lima tahun terakhir.

Tahun	Jumlah Armada Perikanan (dalam unit)		
	Perahu tanpa motor	Perahu Motor	Kapak Motor
1986	152	52	57
1987	148	54	63
1988	153	67	73
1989	134	69	103
1990	117	58	107

Sumber : Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, 1991

Dari tabel 7 tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa jumlah perahu tanpa motor cenderung menurun, sedangkan perahu motor baik perahu motor tempel maupun kapal motor dalam unitnya cenderung meningkat dalam periode 1986 - 1990.

Menurunnya perahu tanpa motor dan motor tempel sebagai akibat dari beralihnya nelayan ke armada kapal motor yang lebih besar. Meningkatnya nelayan untuk beralih ke kapal motor besar sebagai akibat dari keharusan untuk menjangkau laut dalam. Karena dengan pemakaian motorisasi, maka daerah operasi penangkapan ikan nelayan akan menjangkau laut lepas yang luas, sehingga penghasilan nelayan akan satu daerah dan musim ikan akan berkurang.

b. Sarana Alat Penangkapan

Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Kelurahan Lappa dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Alat Penangkapan Ikan Dalam Lima Tahun Terakhir (1986 - 1990) di Kelurahan Lappa Kabupaten Singjai.

No.	Jenis Alat	Jumlah Unit				
		1986	1987	1988	1989	1990
1.	Pukat cincin	19	24	24	27	33
2.	Jaring insang hanyut	55	25	25	28	28
3.	Jaring klitik	33	39	42	17	53
4.	Bagan perahu	48	40	47	35	35
5.	Bagan tancap	5	8	4	2	2
6.	Rawai hanyut	15	15	15	10	10
7.	Drammel net	36	40	45	42	42
8.	Pancing tonda	45	35	25	13	13
9.	Pancing lain	98	98	98	85	90
10.	Sero	10	10	15	14	14
11.	Bubu	15	15	19	22	22
12.	Huhate	-	-	-	24	24
13.	Lain-lain	25	22	22	10	7

Sumber : Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Singjai.

Pada tabel 8 di atas terlihat bahwa jenis alat penangkapan pukat cincin (Gae), Jaring Klitik, Pancing dan Huhate mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Keadaan Sarana dan Prasarana Penunjang

a. Sarana Penunjang Produksi Perikanan

Sarana penunjang produksi perikanan di Kelurahan Lappa dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Jumlah Sarana Penunjang Produksi Perikanan di Kelurahan Lappa.

No.	Sarana	Jumlah
1.	Toko	14
2.	Kios/Warung	4
3.	Gudang	3
4.	Bank (BRI Unit Desa)	2
5.	Koperasi	1
6.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1

Sumber : Kantor Kelurahan Lappa, 1991

Sebagai konsekwensi dari kegiatan perikanan adalah kegiatan ekonomi, dimana hasil produksi yang dicapai pada setiap sektor usaha akan ditentukan oleh nilai hasil usaha dalam bentuk uang.

Kegiatan produksi sebagai kegiatan ekonomi sangat perlu adanya sarana penunjang produksi agar hasil perikanan tetap meningkat dan memberikan kesejahteraan pada

masyarakat.

b. Sarana Perhubungan

Prasarana dan sarana perhubungan memegang peranan penting dalam pengembangan suatu daerah. Mengingat kedudukan Kelurahan Lappa sebagai sentra produksi perikanan di Kabupaten Sinjai. Untuk melihat sarana perhubungan yang terdapat di Kelurahan Lappa dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Jumlah dan Jenis Sarana Perhubungan yang Terdapat di Kelurahan Lappa.

No.	Sarana Perhubungan	Jumlah
1.	Truk	4 buah
2.	Pickup	20 buah
3.	Sepeda Motor	75 buah
4.	Sepeda	47 buah
5.	Becak	69 buah
6.	Televisi	67 buah
7.	Radio	68 buah

Sumber : Kantor Kelurahan Lappa, 1991

Tabel 10 tersebut di atas menunjukkan banyaknya sarana perhubungan, yaitu truk 4 buah, pickup 20 buah, sepeda motor 75 buah, sepeda 47 buah, becak 69 buah dan sarana perhubungan melalui alat komunikasi berupa Radio 68 buah dan Televisi 67 buah. Sarana penunjang lainnya, jalan aspal 4,5 km, jalan kerikil 6 km.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Sosial Ekonomi Responden

a. Tingkat Umur

Umur seseorang akan mempengaruhi kemampuan fisik bekerja dan cara berfikirnya. Pada umumnya nelayan yang berumur muda dan sehat, kemampuan fisiknya lebih besar, lebih dinamis dan lebih mudah menerima/menerapkan inovasi yang disampaikan dari pada nelayan yang telah tua. Hal lain yang ikut mempengaruhi tingkat penerimaan inovasi baru yang disampaikan adalah tingkat pendidikan dan pengalaman.

Pembatasan umur muda (produktif penuh) dan tua (kurang produktif dan tidak produktif) masih relatif. Menurut Daldjoeni (1986) dalam Siampa (1989) pengelompokan yang lebih teliti adalah umur 0 - 14 tahun (belum produktif), umur 15 - 19 tahun (belum produktif penuh), umur 20 - 54 tahun (produktif penuh) dan umur 55 - 64 tahun (tidak produktif penuh lagi) serta umur 65 tahun keatas tidak produktif lagi. Adapun tingkat umur nelayan responden dapat dilihat pada tabel 11. Pada tabel tersebut terlihat bahwa umumnya nelayan responden berada pada kelompok produktif penuh (94,4%) dan yang belum produktif penuh (5,6%). Dengan demikian nelayan di lokasi penelitian ini terdiri dari berbagai tingkatan umur, mulai dari umur 15 tahun sampai dengan umur 65 tahun. Sawi memulai

bekerja dari umur muda sedangkan ponggawa dan juragan bekerja sebaliknya.

Tabel 11. Tingkat Umur Nelayan Responden Menurut Status di Kelurahan Lappa.

Kisaran Umur (tahun)	Status Nelayan		
	Ponggawa (orang)	Juragan Laut (orang)	Sawi (orang)
0 - 14	-	-	-
15 - 19	-	-	2
20 - 54	2	20	12
55 - 64	-	-	-

Sumber : Data primer setelah diolah, 1991

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan nelayan akan berpengaruh terhadap adopsi inovasi dan manajemen produksi. Nelayan yang berpendidikan akan cepat dan aktif mencari hal-hal baru. Tingkat pendidikan nelayan responden dapat dilihat pada tabel 12.

Dari tabel 12 tersebut, terlihat bahwa tingkat pendidikan nelayan responden kebanyakan tidak tamat SD. Hal ini terjadi karena kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, serta sistim upah yang tidak membedakan usia. Dari 36 nelayan responden, terdapat 44,4% nelayan responden yang tidak tamat SD (9 orang juragan laut dan 7 orang sawi), 33,3% tamat SD (8 orang juragan laut dan 4 orang sawi),

Tabel 12. Tingkat Pendidikan Nelayan Responden Menurut Status di Kelurahan Lappa.

Tingkat Pendidikan	Status Nelayan				%
	Ponggawa (orang)	Juragan Laut (orang)	Sawi (org)	Jumlah (org)	
Tidak tamat SD	-	9	7	16	44,4
SD	-	8	4	12	33,3
SLTP	1	2	3	6	16,7
SLTA	1	1	-	2	5,6
Jumlah	2	20	14	36	100,0

Sumber : Data primer setelah diolah, 1991

16,7% nelayan responden yang tamat SLTP (1 orang Ponggawa 2 orang juragan laut dan 3 orang sawi) sedangkan yang tamat SLTA 5,6% (1 orang ponggawa dan 1 orang juragan laut) Golongan yang tidak tamat SD kemungkinan untuk menerima inovasi adalah rendah, sedangkan yang tamat SD akan menerima inovasi walaupun tidak akan sama baiknya dengan golongan yang berpendidikan lebih tinggi (SLTP dan SLTA).

c. Status Nelayan

Didalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan dijelaskan bahwa nelayan digolongkan atas 2, yaitu pemilik dan penggarap (Pasal 1 Undang-undang Bagi Hasil Perikanan). Namun kenyataan yang ada di lapangan bahwa dari golongan penggarap ini masih ada golongan yang dihormati, karena dialah yang bertanggung jawab baik terhadap pemilik maupun terhadap sawi. Golongan ini lazimnya disebut sebagai

juragan laut dan dalam pembagian hasil tetap mendapat bagian sesuai haknya sebagai penggarap dan biasanya mendapat sejumlah bonus dari pihak pemilik.

Ponggawa merupakan pemilik dari suatu unit penangkapan yang dengan hak apapun berkuasa atas unit penangkapan tersebut, yang selanjutnya diberikan kepada pihak lain yaitu penggarap (juragan laut dan sawi) untuk diope- rasikan dengan sistim bagi hasil. Sawi adalah golongan penggarap yang hanya menyediakan tenaganya dalam suatu operasi penangkapan.

Disamping itu, dilokasi penelitian terdapat pula ne- layan yang bertindak sebagai pemilik, juga sekaligus se- bagai pekerja. Dalam hal ini ia bertindak sebagai jura- gan laut yang mempekerjakan sawi (tenaga kerja). Golongan ini disebut pemilik pekerja. Untuk lebih jelasnya status nelayan responden dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Status Nelayan Responden di Kelurahan Lappa.

Ponggawa	Juragan Laut	Pemilik-pekerja (Juragan Laut)	Sawi
2	2	18	14

Sumber : Data primer setelah diolah, 1991

Pada tabel 13 di atas, terlihat bahwa ada 50% re- sponden bertindak sebagai pemilik pekerja yaitu ponggawa yang merangkap sebagai juragan laut, 5,6% adalah ponggawa



dan 38,8% adalah sebagai sawi serta 5,6% responden sebagai juragan laut.

Pemilikan Perahu dan Pola Operasi Penangkapan

a. Pemilikan Perahu dan Alat Tangkap

Dari 36 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, 18 responden adalah nelayan pemilik yang merangkap sebagai pelaksana penangkapan ikan (juragan laut) 2 responden sebagai ponggawa (juragan darat), 2 orang sebagai juragan laut dan 14 orang sebagai sawi.

Berdasarkan kriteria jenis perahu/ukuran motor alat penggerak nelayan responden di Kelurahan Lappa, dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Distribusi Nelayan Responden Menurut Jenis/Ukuran Motor alat penggerak di Kelurahan Lappa.

Jenis/Ukuran Motor	Jumlah responden	Rata-rata Ukuran Motor (PK)	Kisaran (PK)
Perahu tanpa motor	5	-	-
Perahu motor kecil (M. tempel)	5	8	2 - 7
Perahu motor sedang (< 30 PK)	10	23,8	23 - 27
Perahu motor besar (> 30 PK)	2	33	33

Sumber : Data primer setelah diolah, 1991

Sedangkan jenis alat tangkap yang dipakai nelayan responden terdiri dari Pole and Line (Huhate), Gae

pancing tonda, Bagan Perahu dan Lanra' (jaring). Masing-masing alat tangkap ini memiliki kegunaan sesuai dengan sasaran ikan yang akan ditangkap. Jenis alat tangkap yang dipakai oleh nelayan responden dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Distribusi Nelayan Responden Menurut Jenis Alat Tangkap di Kelurahan Lappa.

Jenis Alat Tangkap	Jumlah Responden	Persentase
Pole and Line (Huhate)	2	2,09
Gae (Pukat Cincin)	5	22,73
Bagan Perahu	3	13,64
Pancing Tonda	2	2,09
Lanra' (Jaring)	10	45,45
Jumlah	22	100,00

Sumber : Data primer setelah diolah, 1991

Pada tabel 15 di atas terlihat bahwa 45,45% nelayan responden yang memakai alat tangkap Lanra' (jaring). Alat tangkap ini dipakai oleh nelayan responden yang mempergunakan perahu tak bermotor dan perahu motor. Sedangkan Huhate dipakai oleh 2 orang responden (2,09%), Gae 5 responden (22,73%), Bagan Perahu 3 responden (13,64%) dan Pancing Tonda 2 responden (2,09%) yang masing-masing memakai perahu motor.

b. Pola Operasi Penangkapan

Dalam operasi penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh musim. Seperti juga di lokasi penelitian mengalami dua musim dalam tiap tahunnya. Musim pertama yaitu musim barat, berlangsung sekitar bulan September sampai bulan April. Musim kedua disebut musim timur, berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Agustus, pada musim ini kegiatan penangkapan agak menurun atau disebut juga musim paceklik. Musim paceklik ditandai dengan hasil tangkapan yang rendah dan cuaca tidak menguntungkan, dimana banyak hujan dan gelombang gesar serta gerombolan-gerombolan ikan bermigrasi ke Selat Makassar dengan mengikuti arus air. Sehingga pada musim ini banyak nelayan yang berpindah untuk menangkap ikan di Selat Makassar antara lain ke Kabupaten Barru dan Kota Madya Ujung Pandang.

Walaupun terdapat dua musim yang berbeda, tetapi dengan adanya program motorisasi perahu nelayan di Kelurahan Lappa, jumlah hari penangkapan (trip) dalam tiap bulan antara dua musim tersebut tidak jauh berbeda. Yang berbeda adalah jarak operasinya dan jumlah nilai tangkapan. Pada musim banyak ikan daerah operasi penangkapan tidak begitu jauh dari pantai dan sebaliknya pada musim paceklik daerah operasi penangkapan ikan akan lebih jauh.

Masa penangkapan ikan yang dikenal dengan 'masaturo' berlangsung 20 sampai 22 hari per bulan. Delapan atau sepuluh hari berikutnya disebut 'sala turo' karena ikan yang didapatkan pada masa ini berkurang. Pada saat

'sala turo' kegiatan penangkapan dihentikan, selanjutnya digantikan dengan perbaikan-perbaikan perahu, alat tangkap dan motor yang rusak.

Pola Usaha Penangkapan Ikan dan Hubungan Kerja

a. Bentuk Usaha

Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan terdiri dari usaha keluarga dan usaha swasta. Yang dimaksud dengan usaha keluarga adalah usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh kepala keluarga bersama anggota keluarganya. Tenaga kerja yang digunakan sedikit. Berkisar 1 - 3 orang per unit penangkapan dan ukuran unit penangkapan yang digunakan juga tergolong kecil. Pengelolaan usaha penangkapan ikan dimulai dari operasi penangkapan ikan sampai pada penjualan hasil tangkapan dilakukan oleh kepala keluarga. Sedangkan pada bentuk usaha swasta, ukuran unit penangkapan ikan umumnya lebih besar serta skala usaha yang lebih besar pula. Pengelolaan operasi penangkapan ikan sampai pada penjualan hasil tangkapan diatur oleh ponggawa (Mappangaja, 1981).

Menurut cara kerjanya, karakteristik nelayan di lokasi penelitian di bagi ke dalam dua kelompok nelayan yaitu nelayan yang bekerja secara individual (sendirian) dan kelompok nelayan yang bekerja secara bersama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 16.

Pada tabel tersebut terlihat bahwa kelompok nelayan yang pertama yang bekerja secara individual terdiri dari nelayan yang memakai alat tangkap Lanra' dan selanjutnya

Tabel 16. Karakteristik Kerja Nelayan Responden Dalam Operasi Penangkapan Ikan di Kelurahan Lappa.

No.	Cara Kerja	Jenis Perahu/Ukuran Motor	Jenis Alat Tangkap
1.	Kerja Individual	- Perahu Tanpa Motor	- Lanra'
		- Perahu Motor Kecil	- Lanra'
2.	Kerja Sama	- Perahu Motor Sedang (< 30 PK)	- Bagan Perahu - Pancing Tonda - Gae
		- Perahu Motor Besar (> 30 PK)	- Huhate

Sumber : Data primer setelah diolah, 1991

kelompok ini disebut sebagai nelayan pemilik pekerja individual. Dalam kelompok ini pemilik unit penangkapan ikan bertindak sebagai pelaksana operasi penangkapan ikan dan pengelolaan pemasaran diserahkan kepada istrinya, dengan membawa ke pasar. Unit penangkapan ikan atau perahu yang dipergunakan tergolong kecil yaitu mempergunakan perahu tak bermotor dan perahu motor kecil (motor tempel). Sedangkan kelompok nelayan yang bekerja secara bersama terdiri dari nelayan yang mempergunakan alat tangkap Gae, Bagan Perahu, Huhate, Pancing Tonda, dimana mempergunakan perahu/kapal ukuran yang lebih besar. Pada kelompok ini terdapat unsur ponggawa dan sawi. Dalam kelompok ini ditemukan nelayan, dimana ponggawa sebagai pemilik bertindak sebagai juragan laut.

b. Hubungan Kerja Juragan dan Sawi

Juragan dimaksudkan adalah pemilik unit penangkapan (perahu dan alat tangkap) atau ponggawa perahu. Ponggawa (juragan) dalam menerima seseorang untuk menjadi sawi biasanya hal yang diperhatikan adalah segi keterampilannya, disamping hubungan kekerabatan yang lebih dekat mendapat prioritas untuk diterima oleh juragan. Jika seseorang telah menjadi sawi pada seorang ponggawa, maka hubungan kedua pihak (ponggawa dan sawi) akan berkembang bukan saja dalam kesatuan kerja (unit of working) tetapi juga menjadi suatu kesatuan hidup (unit of living). Sebagai juragan harus membantu sawinya jika memerlukan bantuan dan sebagai ponggawa (juragan) adanya pinjaman tersebut (bantuan) merupakan jaminan bahwa sawi tersebut tetap akan bekerja padanya. Dengan demikian mudah tidaknya seseorang sawi dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan ponggawa, dipengaruhi oleh ada tidaknya pinjaman yang diterima sawi dari juragannya.

c. Hubungan Kerja Ponggawa Ikan (Pappalele) dengan Ponggawa Perahu (Juragan Laut)

Apabila pemilik usaha penangkapan ikan (ponggawa perahu) telah mempunyai sedikit modal dan ingin memperbesar usahanya sering meminta/memperoleh bantuan berupa alat tangkap dan mesin dari pedagang pengumpul ikan (ponggawa ikan). Dalam hal demikian ditetapkan persyaratan yang disepakati bersama antara kedua belah pihak. Ponggawa perahu (pemilik usaha penangkapan ikan) diharuskan menjual

ikan hasil tangkapannya kepada pemberi bantuan dalam hal ini ponggawa ikan dan selanjutnya ponggawa ikan (pappalele) yang menjualnya di tempat pelelangan ikan (TPI).

Dari hasil penjualan tersebut, ponggawa ikan mendapat komisi dari hasil penjualan tersebut, besarnya komisi (bagian) yang diperoleh tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak (ponggawa ikan dan pemilik unit penangkapan ikan). Untuk yang mendapat bantuan/pinjaman yang besar (mesin dan alat tangkap), pemberi bantuan akan mendapat komisi yang lebih besar pula. Pada umumnya bagian (komisi) yang diterima oleh ponggawa ikan dari hubungan kerja ini adalah 10% dari hasil kotor.

Hasil (harga) penjualan ikan yang diatur oleh Ponggawa ikan dicatat, selanjutnya harga hasil penjualan itu diserahkan kepada ponggawa perahu sebagai pemilik unit penangkapan ikan dalam bentuk nota/kwitansi. Nota hasil penjualan tersebut dikumpulkan dan disimpan untuk selanjutnya setelah selesai masa turo baru diuangkan.

Dari hasil penjualan ikan selama satu turo dikurangi dengan hasil komisi yang didapat oleh ponggawa ikan sebanyak 10% itulah merupakan penerimaan yang diterima oleh pemilik unit penangkapan yang dibagikan kepada sawinya, dengan sistim bagi hasil. Bagian yang diterima oleh pemilik unit penangkapan ikan disisihkan sebagian untuk membayar pinjaman/bantuan yang diterima. Besarnya yang harus distor setiap bulannya tergantung kepada kemampuan ponggawa perahu. Ikatan ini dinyatakan berakhir setelah semua

pinjaman dilunasi. Makin lama ikatan ini berlangsung akan menguntungkan pihak pemberi pinjaman yang semakin besar karena pada setiap penjualan hasil akan mendapat komisi dari penjualan tersebut sesuai perjanjian.

Apabila dalam suatu operasi penangkapan ikan tidak mendapatkan hasil atau hasil yang didapatkan hanya sedikit, keadaan ini tidak dilaporkan kepada ponggawa ikan karena hasil tangkapan tersebut tidak untuk dipasarkan, tetapi hasil tersebut dibagikan kepada sawinya sebagai bagian untuk keluarganya atau upah hariannya untuk membeli rokok dan lain-lain (pakkanreangeng).

Sistim Bagi Hasil

Pembagian hasil dilakukan setelah berakhir satu kali masa turo. Dimana segala keperluan sawi pada masa turo tersebut yang sifatnya mendesak ditanggung oleh ponggawa laut yang memimpin atau menjadi pemilik usaha ini. Dan tentunya keperluan sawi disesuaikan dengan hasil yang diperoleh sebelumnya.

Pada usaha penangkapan dengan menggunakan perahu dan perahu motor kecil (motor tempel) dalam bentuknya yang berskala kecil, nelayan hanya membutuhkan tenaga kerja (sawi) yang relatif kecil pula, bahkan tanpa dibantu oleh sawi. Dalam ukuran dan bentuk yang demikian, tidak ditemukan adanya pembagian pendapatan yang jelas. Hasil tangkapan yang diperoleh dipergunakan untuk kepentingan usaha dan kebutuhan keluarganya.

Perkembangan usaha ke arah yang lebih besar, misalnya dalam segi jumlah dan ukuran unit penangkapan, menyebabkan keperluan tenaga kerja tersebut dipenuhi dari luar keluarga. Bersamaan dengan adanya tenaga kerja dari luar keluarga tersebut diperjelas pulalah sistim pembagian hasil usaha. Sistim bagi hasil didasarkan atas kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak dan pembagian yang umum berlaku di lokasi tersebut.

Untuk itu penetapan bagi hasil akan kami bahas pada usaha penangkapan ikan yang berskala besar (ukuran motor sedang dan besar) yang menggunakan alat tangkap Bagan Perahu, Pancing tonda, Gae (Pukat cincin), Huhate (Pole and Line).

Penetapan bagi hasil keempat usaha penangkapan tersebut di atas dapat dilihat sebagai berikut :

a. Huhate (Pole and Line)

Pole and Line (Huhate) adalah jenis alat tangkap yang dapat diklasifikasikan sebagai alat pancing yang biasanya dipakai dalam penangkapan ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis sp). Pancing tersebut digunakan secara perorangan, sehingga salah satu faktor yang mempengaruhi suksesnya penangkapan ialah keterampilan perorangan dan para pemancing berada dihaluan perahu (Rauf, 1985).

Jumlah tenaga kerja yang dipergunakan dalam mengoperasikan alat tangkap ini adalah 13 orang, terdiri dari juragan laut yang bertindak sebagai pemimpin/kapten dan tenaga kerja lainnya terdiri dari bas, boy-boy dan sawi.

Jumlah tenaga kerja inilah yang mempengaruhi sedikit banyaknya bagian yang diperoleh masing-masing tenaga kerja dengan tidak mengubah besarnya perbandingan antara pihak ponggawa dan penggarap.

Pembagian hasil dari hasil penangkapan ikan ini dilakukan pada tiap selesai masa tura (20 hari perbulan). Dimana hasil yang dibagi adalah hasil bersih yaitu nilai hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Di lokasi penelitian, sistim bagi hasil pada usaha penangkapan Huhate adalah dengan perbandingan 1 : 1. Satu bagian atau 50 % untuk pemilik kapal/pongawa dan 50 % untuk penggarap. Dari 50 % bagian untuk penggarap tersebut dibagi lagi menurut statusnya, masing-masing 1,5 bagian untuk kapten, bas dan boy-boy serta 1 bagian untuk sawi. Dari analisa pendapatan pada usaha penangkapan ini diperoleh penerimaan sebanyak Rp.4.151.000,- bagian yang diperoleh ponggawa/pemilik adalah Rp.2.075.000,- sedangkan bagian yang diperoleh penggarap adalah 50 % dari penerimaan tersebut yaitu Rp.2.075.000,- yang selanjutnya dibagi lagi berdasarkan statusnya. Untuk kapten, bas dan boy-boy mendapat Rp.214.706,- sedangkan bagian untuk sawi adalah Rp.143.137,-.

Dari perbandingan bagi hasil 50% : 50% tersebut memperlihatkan bahwa perbandingan ini tidak bertentangan dengan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan, dimana pasal 3 ayat 2 ditetapkan bahwa jika dipergunakan alat tangkap

dengan menggunakan kapal motor kepada pihak penggarap diberikan bagian sekurang-kurangnya 40% dari hasil bersih.

b. Bagan Perahu

Bagan ini dibuat dari perahu, dimana pada bagian atas perahu tersebut dibuat rumah kecil sebagai tempat berlindung dari tiupan angin dan hujan.

Bagan adalah merupakan salah satu alat tangkap yang memanfaatkan salah satu behaviour ikan (phototaxix). Tertariknya ikan pada cahaya sering disebutkan karena antara lain, cahaya merangsang ikan dan menarik (attract) ikan untuk berkumpul pada sumber cahaya itu atau juga disebutkan karena rangsangan (stimulus) ikan lalu memberikan responsenya (Ayodhya, 1981).

Sumber cahaya yang dipergunakan pada bagan perahu ini adalah lampu petromaks. Agar pada operasi penangkapan ini tidak bergerak maka dipergunakan jangkar, selanjutnya bagan ini dapat dipindahkan ke tempat operasi penangkapan ikan yang diinginkan.

Pembagian hasil dari Bagan perahu ini seperti halnya dengan alat penangkapan Pole and Line dilakukan pada masa turo. Dan hasil yang dibagi adalah hasil bersih. Besarnya bagian masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan bersama sebelumnya dan pembagian yang umum dilakukan.

Adapaun sistim pembagian pada usaha bagan perahu ini adalah $\frac{1}{3}$ bagian untuk motor (perahu motor) dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk Bagan perahu dari pendapatan kotor. Pendapatan kotor ini dimaksudkan yaitu hasil penjualan setelah

ikan (hasil tangkapan) dilelang, belum ada pengurangan biaya operasionalnya. Adanya bagian 1/3 bagian untuk motor tersebut karena dia yang mengambil (menjemput) ikan hasil tangkapan dan membawanya ke tempat pelelangan ikan (TPI) untuk dipasarkan. Nelayan ini disebut 'Pabbilolang' yang biasanya masih ada hubungan keluarga dengan pemilik bagan.

Misalkan dari analisa pendapatan pada usaha penangkapan Bagan perahu didapatkan penerimaan dalam satu masa turo sebanyak Rp.1.848.000,-. Setelah dipotong biaya penjualan (10%) dan retribusi TPI (3%) dari penerimaan maka sisa penerimaan Rp.1.607.760,-. Dari penerimaan ini nelayan 'pabbilolang' mendapat 1/3 bagian yaitu sebesar Rp.535.000,- dan bagian untuk pemilik bagan 2/3 bagian yaitu sebesar Rp.1.071.000,-. Dari penerimaan untuk unit bagan ini dipotong biaya produksi sebesar Rp.200.000,- dan biaya perawatan sebesar Rp.15.000,- maka sisa penerimaan sebesar Rp.856.840,-. Jumlah penerimaan untuk bagan inilah yang dibagikan berdasarkan sistim bagi hasil 1 : 1 50% bagian untuk pemilik (juragan laut) dari penerimaan tersebut yaitu Rp.428.420,- dan 50% bagian untuk penggarap yang terdiri dari 6 orang. Sehingga pendapatan persawi adalah Rp.71.403,-.

Untuk lebih jelasnya sistim pembagian pada usaha penangkapan ini dapat dilihat pada lampiran 6. Makin banyak sawi yang dipergunakan bagaian antar sawi semakin kecil.



c. Pancing Tonda.

Pancing tonda dioperasikan dengan menggunakan perahu motor/sampan. Alat tangkap ini ditonda oleh para nelayan di belakang perahu, kesana kemari mencari gerombolan ikan Tali pancing atau jenis pancing ini tidak diberi pemberat atau mengapung. Pancing ini digunakan untuk menangkap ikan Tuna, ikan Tongkol dan lain-lain (Kallo, 1982).

Jumlah tenaga kerja yang dipergunakan dalam pengoperasian alat ini terdiri dari empat orang. Satu orang sebagai juragan laut yang bertindak sebagai pemilik dan tiga orang lainnya sebagai sawi. Pembagian hasil dilakukan pertrip. Dimana dalam satu kali masa turo dapat dilakukan tiga kali operasi penangkapan (tiga kali trip).

Sistim pembagian hasil dilakukan setelah nilai ikan dikurangi dengan biaya-biaya selama operasi penangkapan berlangsung atau dengan kata lain hasil bersih. Hasil bersih inilah yang dibagi berdasarkan sistim 1 : 1 atau 50% bagian untuk pemilik yang merangkap sebagai juragan laut dan 50% bagian untuk sawi. Misalkan dari analisa pendapatan Pancing tonda didapatkan penerimaan kotor sebanyak Rp.1.665.000,- setelah dipotong biaya operasi/turo Rp.617.000,-, biaya pemeliharaan Rp.22.500,-, komisi penjualan sebanyak 10% yaitu Rp.166.500,- dan biaya retribusi TPI 3% Rp.49.950,- maka penerimaan tinggal Rp.809.050,-. Penerimaan inilah yang dibagikan kepada pemilik dan penggarap. Besarnya bagian untuk pemilik Rp.404.923 dan bagian penggarap Rp.404.525,-. Bagian untuk penggarap yang

Rp.404.525,- ini yang akan dibagi tiga berdasarkan jumlah sawi yang dipergunakan, yaitu Rp.134.841,-.

Apabila pemilik unit penangkapan mempekerjakan juragan laut maka bagian yang diperoleh juragan laut diambil dari bagian pemilik sebanyak 20%.

d. Gae (Pukat Cincin)

Pukat cincin di daerah penelitian dikenal dengan nama 'Gae'. Gae ini termasuk dalam kelompok Seine Nets yaitu kelompok dari alat yang dioperasikan dengan cara melingkarkan jaring pada suatu daerah operasi penangkapan ikan tertentu (encircling net).

Pembagian hasil dari alat tangkap ini dilakukan dalam tiap selesai masa turo (sekitar 20 hari perbulan). Seperti halnya dengan alat tangkap Pancing tonda, Huhate, Bagan perahu, dimana sistim bagi hasil yang berlaku adalah sistim 1 : 1. Satu bagian atau 50% bagian untuk pemilik yang sekaligus sebagai juragan laut, tetapi apabila tidak bertindak sebagai juragan laut maka bagian untuk juragan laut tersebut diambil dari bagian pemilik sebanyak 20%. Dan satu bagian lainnya (50%) untuk sawi. Hasil yang dibagikan ini adalah hasil bersih setelah seluruh biaya-biaya dipotong selama penangkapan.

Misalkan dari data analisa pendapatan pada unit usaha 'Gae' nilai hasil tangkapan dalam satu turo adalah sebesar Rp.2.576.000,- setelah dikurangi biaya-biaya yaitu : Biaya eksploitasi/turo Rp.420.000,-, biaya pemeliharaan alat Rp.16.875,- retribusi TPI (3%) sebesar Rp.77.280,- dan

komisi penjualan sebanyak 10% dari nilai hasil tangkapan yaitu Rp.257.600,- Maka sisa penerimaan pada unit usaha penangkapan ini adalah Rp.1.804.245,- Jumlah penerimaan inilah yang dibagikan. 50% dari penerimaan atau Rp.902122 bagian untuk ponggawa dan 50% lainnya untuk sawi. Karena jumlah sawi yang dipergunakan adalah 12 orang, maka Rp.902.122,- dibagi 12 adalah Rp.75.176,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 8.

Usaha Penangkapan Ikan dan Pendapatan Nelayan

a. Pembiayaan

Usaha penangkapan ikan dapat dipandang sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menambah nilai kegunaan daripada barang dan jasa (Hanafiah dan Saefuddin,1983) Selanjutnya dikatakan bahwa pembiayaan erat kaitannya dengan kredit. Menggunakan kredit berarti menggunakan modal orang lain yang nantinya harus dikembalikan berikut bunganya yang dapat diperoleh dari pihak-pihak penyalur kredit misalnya dari pihak swasta (perorangan) dan pihak pemerintah seperti Koperasi dan Bank.

Ada anggapan bahwa nelayan tidak dapat meningkatkan produksinya karena kekurangan biaya terutama sekali dalam menyediakan sarana dan prasarana produksi. Dengan demikian dapat menyeret petani atau nelayan kepada situasi yang sukar dipecahkan seperti terlibatnya mereka dengan sistim ijon. Terlibatnya petani atau nelayan dalam sistim ijon adalah karena tidak ada alternatif kredit yang lebih baik bagi petani/nelayan (Mubyarto, 1979).

Secara umum biaya dapat dibedakan atas :

- Biaya investasi, untuk membangun unit usaha perikanan diperlukan biaya investasi berupa pembelian perahu, mesin (motor) dan alat-alat penangkapan.
- Biaya operasi, adalah biaya yang dikeluarkan dalam pengoperasian alat penangkapan. Biaya tersebut meliputi: bahan bakar, beras, gula, kopi dan lain-lain.
- Biaya pemeliharaan adalah semua biaya yang dipergunakan untuk perbaikan dan perawatan yang meliputi perahu, motor/mesin dan alat tangkap.
- Biaya penyusutan, biaya penyusutan dapat terjadi karena pengaruh umur alat yang terpakai. Biaya penyusutan bertujuan untuk cadangan yang diharapkan akan menggantikan alat tersebut yang aus. Biaya penyusutan diperoleh dengan membagi harga perolehan alat dengan umur ekonomis (Nur, 1991).

Dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan biaya-biaya yang dikeluarkan disebut sebagai beban. Beban ini ada yang ditanggung bersama dan ada pula yang ditanggung pemilik. Beban yang ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap selama penangkapan adalah ongkos lelang, biaya untuk sedekah laut dan dana kematian. Sedangkan yang menjadi tanggungan pemilik adalah ongkos pemeliharaan dan perbaikan, biaya penyusutan dan biaya eksploitasi.

Kenyataan yang didapati di lokasi penelitian adalah bahwa kedua beban tanggungan tersebut di atas dibagi sama dengan cara memotong dari hasil kotor yang diperoleh

setelah penangkapan. Biaya yang ditanggung bersama adalah biaya eksploitasi dan biaya perbaikan/perawatan yang langsung disisihkan terlebih dahulu sebelum pembagian hasil dilakukan.

b. Pendapatan Nelayan

Menurut Soeharjo dan Patong (1986) pendapatan adalah selisih antara penerimaan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi suatu usaha atau diartikan sebagai balas jasa dari kerjasama faktor-faktor produksi.

Dari unit penangkapan (sampel) yang diteliti diketahui bahwa faktor produksi modal dan manajemen disediakan oleh ponggawa (juragan) sebagai pemilik usaha dan buruh nelayan (sawi) sebagai pekerja mencurahkan hanya tenaga dan keterampilannya. Disamping itu pada usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap seperti Bagan perahu, Gae dan Pancing tonda juragan sebagai pemilik faktor produksi juga ikut sebagai pekerja.

Berdasarkan nilai ikan yang diterima ditentukan bagi hasil yang disepakati sebelumnya. Selain sistim bagi hasil yang digunakan, besarnya jumlah pendapatan akan bervariasi menurut besarnya jumlah hasil tangkapan, harga jual ikan dan besarnya modal yang dikeluarkan oleh pemilik. Untuk kebutuhan analisis di sini hasil tangkapan dan pendapatan dihitung untuk satuan waktu satu turo (dalam satu bulan sekitar 20 hari operasi penangkapan). Hasil tangkapan selama satu turo bervariasi menurut ukuran

alat tangkap, jenis dan kemampuan teknologi (motorisasi) yang dipakai.

Kemampuan pengoperasian unit penangkapan (trip) dan tingkat ketersediaan ikan (availability fish) di lokasi penangkapan (fishing ground). Ketersediaan ikan juga bervariasi menurut musim dan jenis-jenis ikan tertentu, dapat mempunyai kepadatan populasi (density) lebih besar pada kurun waktu tertentu, di lokasi perairan tertentu. Ini disebut musim ikan yang puncaknya ditandai dengan hasil tangkapan yang maksimal pula.

Menurut Mappangaja (1981) pendapatan nelayan dapat didekati dari dua pengertian. (1). Pendapatan sebagai selisih atau beda antara penghasilan dan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan tersebut sebenarnya masih kotor (bruto) sebab didalamnya masih terdapat nilai untuk biaya dan angsuran modal yang diinvestasikan atau nilai penyusutan unit penangkapan. (2). Pendapatan dalam pengertian sebagai balas jasa atau korbanan faktor produksi, setelah dikurangi jumlah nilai penyusutan, bunga dan angsuran modal yang diinvestasikan.

Pengertian pendapatan yang disebut pertama di atas dinamakan pendapatan "tampa kredit" dan yang kedua disebut pendapatan "dengan kredit". Dalam analisa pendapatan

Dalam lima tahun terakhir, penggunaan perahu tanpa motor di Kelurahan Lappa menurun. Pada tahun 1986 dari 261 jumlah armada penangkapan ikan sekitar 58,2% merupakan perahu tanpa motor namun pada tahun 1990 proporsi ini

menurun menjadi 41,8% dari 282 jumlah armada penangkapan ikan. Penurunan jumlah perahu tanpa motor ini juga diikuti oleh perahu motor tempel. Dengan menurunnya jumlah armada tersebut ternyata digantikan oleh armada penangkapan ikan dengan unit kapal/perahu motor dengan ukuran besar, yaitu dari 57 unit pada tahun 1986 menjadi 187 unit pada tahun 1990.

Keadaan ini disebabkan oleh inovasi masyarakat yang telah menyadari bahwa penggunaan motor dalam usaha penangkapan ikan atau dengan kata lain semakin besar ukuran motor yang digunakan jangkauan operasi juga semakin jauh. Yang dengan sendirinya hasil yang didapat juga akan semakin meningkat.

Nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor dan nelayan yang menggunakan motor kecil (motor tempel) tidak mempergunakan atau mempekerjakan sawi. Kalaupun mempergunakan terbatas hanya dari golongan keluarga sendiri dan pemasarannya juga dilakukan oleh keluarganya.

Adapun armada penangkapan ikan yang menggunakan tenaga kerja (sawi) adalah pada armada penangkapan ikan yang berukuran sedang (< 30 PK) dan armada penangkapan ukuran besar (> 30 PK). Banyaknya tenaga kerja bervariasi menurut alat tangkap yang digunakan. Armada yang menggunakan alat tangkap Gae, sawi yang dipergunakan 12 orang, Bagan perahu 6 orang, Pancing tonda 3 orang dan Huhate 13 orang

Perbedaan dalam aktifitas yang dilakukan, jelas akan menimbulkan perbedaan dalam struktur biaya maupun

penerimaan yang diperoleh. Pada tabel 15 disajikan penerimaan dari usaha penangkapan ikan dengan menggunakan keempat kelompok perahu/ukuran motor tersebut.

Tabel 17. Rataan Struktur Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Ikan Perturo berdasarkan Perahu/Ukuran Motor Penggerak.

Penerimaan/Biaya Perturo	Perahu/Ukuran Motor (PK)			
	Perahu Tanpa Motor	Motor Kecil (8PK)	Motor Sedang (<30PK)	Motor Besar (>30PK)
Total Penerimaan	126.900	258.930	1.824.333	7.880.000
Biaya Eksploitasi	-	65.700	412.333	2.560.000
Biaya pemeliharaan	2.850	2.930	18.125	75.000
Komisi/Biaya penjualan	5.400	7.920	182.433	780.000
Retribusi TPI (3%)	-	7.767	54.729	234.000
Penerimaan/unit	118.650	174.613	1.156.713	4.151.000

Sumber : Data primer setelah diolah, 1991.

Dari tabel tersebut di atas terlihat pendapatan nelayan meningkat dengan adanya pemakaian motor dan semakin meningkat dengan pemakaian motor yang semakin besar. Pendapatan nelayan dari keempat type perahu tersebut masing-masing Rp.118.650,- untuk perahu tak bermotor, pendapatan untuk perahu motor kecil Rp.174.613,- untuk perahu motor sedang adalah Rp.1.156.713 dan pendapatan untuk perahu motor besar adalah Rp.4.151.000,-. Dari keempat tipe pendapatan tersebut belum dikurangi biaya penyusutan.

Peningkatan pendapatan tersebut belum dapat dikatakan semata-mata karena adanya penggunaan motor yang berbeda. Hal ini karena adanya hubungan (korelasi) yang kuat antara penggunaan motor dan kapasitas kapal/perahu maupun alat tangkap seperti yang diperlihatkan pada tabel 16 di bawah.

Tabel 18. Karakteristik Usaha Penangkapan Nelayan Berdasarkan Perahu/Ukuran Motor yang Digunakan.

Ukuran	Perahu/Ukuran Motor			
	Perahu Tanpa Motor	Motor Kecil (SPK)	Motor Sedang (<30PK)	Motor Besar (>30PK)
Jumlah responden	5	5	10	2
Rata-rata ukuran motor (PK)	-	8	23,8	33,0
Penggunaan alat tangkap (%)				
- Pole and Line	-	-	-	100
- Gae (Pukat cincin)	-	-	50	-
- Bagan perahu	-	-	30	-
- Pancing tonda	-	-	20	-
- Lanra (jaring)	100	100	-	-
Rata-rata ukuran perahu (meter)				
- Panjang	4,0	6,2	10	10
- Lebar	0,6	0,6	3	3
- Tinggi	0,6	0,6	1	1

Sumber : Data primer setelah diolah, 1991

Kenaikan pendapatan terjadi baik untuk nelayan pemilik marginal (pongawa), juragan laut maupun sawi. Walaupun demikian, kenaikan pendapatan yang diakibatkan oleh motorisasi tampaknya lebih banyak dinikmati oleh golongan nelayan yang memiliki posisi lebih baik. Pada tabel 17 berikut akan disajikan pendapatan nelayan berdasarkan status nelayan tersebut

Tabel 17. Pendapatan Nelayan Pemilik (Pongawa), Juragan Laut dan Sawi Menurut Ukuran Perahu/Motor yang Digunakan

Biaya/Pendapatan Perturo	Perahu Tampa Motor	Motor Kecil (8PK)	Motor Sedang (<30PK)	Motor Bes (>30PK)
Penerimaan nelayan	118.650	174.613	1.156.713	4.151.000
Pendapatan nelayan berdasarkan status				
- Pemilik/pongawa	118.650	174.614	578.357	2.075.500
- Juragan laut	-	-	115.671	214.706
- Persawi	-	-	82.622	143.137
Pendapatan pemilik dikurangi penyusutan				
- Pendapatan : Pemilik/pongawa	118.650	174.614	578.357	2.075.500
- Biaya penyusutan	2.452	38.255	105.229	424.593
- Jadi pendapatan pemilik adalah	116.196	136.358	473.128	1.650.407

Keterangan : * - Apabila pemilik tidak ikut sebagai operator (juragan laut maka bagian untuk juragan laut diambil dari bagian untuk pemilik sebesar 20%

Sumber : Data primer setelah diolah, 1991.

Pada tabel 17 di atas terlihat penerimaan nelayan dari unit perahu motor sedang adalah Rp.1.156.713,-. Pendapatan inilah yang dibagikan dengan perbandingan 1 : 1. Dengan demikian pemilik/pongawa mendapat bagian sebesar Rp.578.357 dan penggarap atau sawi Rp.578.357,- dimana jumlah sawi ada 7 orang, maka pendapatan persawi adalah Rp.82.622,- Apabila dalam unit penangkapan ini pemilik tidak ikut melaut atau mempekerjakan kepada juragan laut maka bagian untuk juragan laut diambil 20% dari bagian pemilik/pongawa. Sedangkan pada unit penangkapan perahu ukuran besar bagian yang didapat oleh ponggawa/atau pemilik adalah 50% dari pendapatan unit penangkapan. Pendapatan pemilik adalah Rp.2.075.500,-, juragan laut sebesar Rp.214.706,- dan pendapatan persawi adalah Rp.143.137,-.

Secara relatif bagian pendapatan pemilik/pongawa terhadap juragan laut adalah 5 : 1 dan pemilik/pongawa terhadap sawi adalah 7 : 1 pada unit perahu motor sedang. Sedangkan pada motor besar adalah pendapatan pemilik terhadap juragan laut adalah 9,7 : 1,0 dan pemilik/pongawa terhadap sawi adalah 14,5 : 1,0, serta pendapatan juragan laut terhadap sawi adalah perbandingan 1,5 : 1,0.

Angka-angka tersebut memberikan indikasi bahwa motorisasi dalam perikanan tangkap cenderung memperbesar kesenjangan pendapatan antara ponggawa sebagai pemilik modal (modal) terhadap juragan laut dan sawinya. Perbedaan pendapatan ini oleh nelayan dapat dimaklumi karena pemilik/pongawa unit penangkapan ikan dimana harus

membayar biaya-biaya lainnya seperti biaya penyusutan alat dan bunga modal. Disamping itu sistim bagi hasil yang diterapkan antara pemilik dan penggarap adalah perbandingan 50% : 50%. Dalam hal ini menurut Undang-undang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 ayat 2 bahwa apabila menggunakan kapal motor, maka kepada pihak penggarap diberikan minimum 40% dari hasil bersih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Dengan adanya pemakaian motor atau dengan semakin besarnya ukuran motor penggerak yang digunakan semakin tinggi pendapatan nelayan.
- Alih teknologi dari tradisional ke teknologi baru (motorisasi) telah membawa berbagai perubahan. Perubahan tersebut meliputi nilai produksi, biaya produksi, pendapatan dan bagi hasil.
- Karakteristik nelayan terdiri dari dua kelompok, yaitu nelayan yang bekerja secara individual (sendirian) dan kelompok nelayan yang bekerja secara bersama.
- Secara relatif pendapatan masing-masing status nelayan meningkat dengan semakin meningkatnya ukuran motor penggerak.
- Sistem bagi hasil di daerah penelitian dipengaruhi oleh kebiasaan setempat dengan perbandingan 1 : 1. Pihak pemilik/ponggawa memperoleh 50% dan pihak penggarap 50% dari hasil bersih.

Saran

Didapatkan informasi bahwa dengan adanya program motorisasi ada gejala penurunan sumberdaya perikanan yang dirasakan oleh nelayan pemakai perahu tanpa motor dan pemakai motor kecil (motor tempel) sebagai akibat dari jumlah tangkapan maupun ukuran ikan yang tertangkap semakin

menurun, utamanya di dekat pantai. Dalam rangka penghematan sumberdaya tersebut program motorisasi tampaknya perlu dikendalikan dengan mengatur jalur penangkapan nelayan berdasarkan besar kecilnya armada penangkapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 1986. Pengaruh Motorisasi terhadap Keluarga Nelayan. Studi Kasus Rumah Tangga Nelayan di Pulau Kodingareng, Kec. Ujung Tanah, Kodya Ujung Pandang Fakultas Pertanian Unhas.
- Agustinus. 1991. Hambatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Sistin Bagi Hasil pada Usaha Penangkapan Ikan di Sulawesi Selatan. Kasus Kelurahan Ponjalae Tapping, Kecamatan Ware Utara, Kabupaten Luwu. Tesis Jurusan Sosek Perikanan Fakultas Peternakan Unhas. Ujung Pandang.
- Anonimous. 1964. Lembarab Negara Republik Indonesia No. 97 Tahun 1964. Bagi Hasil Terikanan. Jakarta.
- _____. 1984. Pewilayahan Komoditi Sebagai Strategi Dasar Pengembangan Wilayah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Paper.
- Ayodhya, A.U. 1981. Metode Penangkapan Ikan. Yayasan Dewi Sri. Bogor.
- Haluan, J. 1988. Suatu Studi Tentang Sistem Motorisasi Pada Usaha Penangkapan Ikan Tradisional. Bulletin Perikanan No. 1 Volume 4. Fakultas Perikanan IPB. Bogor.
- Hanafiah, A.M. dan A.M. Saefuddin. 1983. Tataniaga Hasil Perikanan. UI - Press. Jakarta.
- Husain dan Syahrir. 1983. Studi Tentang Standarisasi Kapal Ikan di Sulawesi Selatan. Proyek Penelitian Unhas. Ujung Pandang.
- Hutabarat, J. 1984. Zone Ekonomi Eksklusif Dipandang dari Sudut Perikanan. Majalah Korpri No. 87 Th VII Korpri Pusat Jakarta. Halaman 32.
- Kallo, A.M. 1982. Teknologi Pertanian/Nelayan Mandar. Studi Kasus Teknologi Tradisional di bidang Pertanian dan Perikanan di Desa Pantai Labuang, Kabupaten Majene. Lembaga Penelitian Unhas. Ujung Pandang.
- Kasryno, F. 1984. Prospek Pengembangan Ekonomi Pedesaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Manurung, V.T. 1983. Nelayan Kecil di Jawa, Kriteria dan Pembinaannya. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Badan Litbang Pertanian Deptan. Jakarta.

- Mappangaja, A.R. 1981. Produksi dan Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut Tradisional. Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mattulada dan R. Adisasmita. 1978. Pengembangan Sumber Daya Kelautan. Lepas Unhas. Ujung Pandang.
- Mattulada, 1982. Antropologi Maritim. Makalah Dalam Rangka Lokakarya Nasional Pengembangan Desa Pantai dan Sumberdaya Kelautan Dalam Hubungannya dengan Ketahanan Nasional. Unhas Ujung Pandang.
- Mubyarto. 1979. Pengantar Ekonpmi Pertanian. LP₃ES. Jakarta.
- _____. 1984. Nelayan dan Kemiskinan. Studi Ekonomi dan Antropologi di Dua Desa Pantai. CV. Rajawali. Jakarta.
- Nurland, F. 1985. Sistem Bagi Hasil dalam Penangkapan Ikan di Kalangan Nelayan Pesisir Pantai di Sulawesi Selatan. Kasus Kabupaten Barru dan Takalar. Proyek Penelitian Unhas. Ujung Pandang.
- Nur, N. 1991. Pola Manajemen Usaha Nelayan Gae. Studi Kasus di Kampung Bayang, Lingkungan Tanjung Merdeka Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang. Fakultas Pertanian Unhas.
- Patong, D. 1986. Sendi-sendi Pokok Ilmu Usaha Tani. Fakultas Pertanian. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- Rauf dan A. Muhiddin. 1985. Pengembangan Perahu Motor Sebagai Sarana Perikanan Rakyat di daerah Tingkat II Luwu. Proyek Penelitian Unhas. Ujung Pandang.
- Rehang. 1991. Pola Alokasi Kerja dan Imbalan Kerja pada Usaha Perikanan Bagan Satu Perahu. Tesis Jurusan Sosek Perikanan Unhas. Ujung Pandang.
- Sallatang, M.A. 1981. Hubungan antara Ponggawa dan Sawi Suatu Studi kasus pada sebuah Kelompok Ponggawa-Sawi di Desa Pabbiringa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Proyek Penelitian Unhas. Ujung Pandang.
- Sempang. 1983. Motorisasi Perahu Penangkap Ikan di Ujung Pandang dan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Fakultas Sains dan Teknologi Unhas. Ujung Pandang.
- Siampa, T. 1989. Beberapa Masalah Pengembangan Proyek Intam di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Jurusan Sosek Perikanan Unhas. Ujung Pandang.

- Mappangaja, A.R. 1981. Produksi dan Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut Tradisional. Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mattulada dan R. Adisasmita. 1978. Pengembangan Sumber Daya Kelautan. Lepas Unhas. Ujung Pandang.
- Mattulada, 1982. Antropologi Maritim. Makalah Dalam Rangka Lokakarya Nasional Pengembangan Desa Pantai dan Sumberdaya Kelautan Dalam Hubungannya dengan Ketahanan Nasional. Unhas Ujung Pandang.
- Mubyarto. 1979. Pengantar Ekonpmi Pertanian. LP₃ES. Jakarta.
- . 1984. Nelayan dan Kemiskinan. Studi Ekonomi dan Antropologi di Dua Desa Pantai. CV. Rajawali. Jakarta.
- Nurland, F. 1985. Sistem Bagi Hasil dalam Penangkapan Ikan di Kalangan Nelayan Pesisir Pantai di Sulawesi Selatan. Kasus Kabupaten Barru dan Takalar. Proyek Penelitian Unhas. Ujung Pandang.
- Nur, N. 1991. Pola Manajemen Usaha Nelayan Gae. Studi Kasus di Kampung Bayang, Lingkungan Tanjung Merdeka Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang. Fakultas Pertanian Unhas.
- Patong, D. 1986. Sendi-sendi Pokok Ilmu Usaha Tani. Fakultas Pertanian. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- Rauf dan A. Muhiddin. 1985. Pengembangan Perahu Motor Sebagai Sarana Perikanan Rakyat di daerah Tingkat II Luwu. Proyek Penelitian Unhas. Ujung Pandang.
- Rehang. 1991. Pola Alokasi Kerja dan Imbalan Kerja pada Usaha Perikanan Bagan Satu Perahu. Tesis Jurusan Sosek Perikanan Unhas. Ujung Pandang.
- Sallatang, M.A. 1981. Hubungan antara Ponggawa dan Sawi Suatu Studi kasus pada sebuah Kelompok Ponggawa-Sawi di Desa Pabbiringa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jene-ponto. Proyek Penelitian Unhas. Ujung Pandang.
- Sempang. 1983. Motorisasi Perahu Penangkap Ikan di Ujung Pandang dan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Fakultas Sains dan Teknologi Unhas. Ujung Pandang.
- Siampa, T. 1989. Beberapa Masalah Pengembangan Proyek Intam di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Jurusan Sosek Perikanan Unhas. Ujung Pandang.

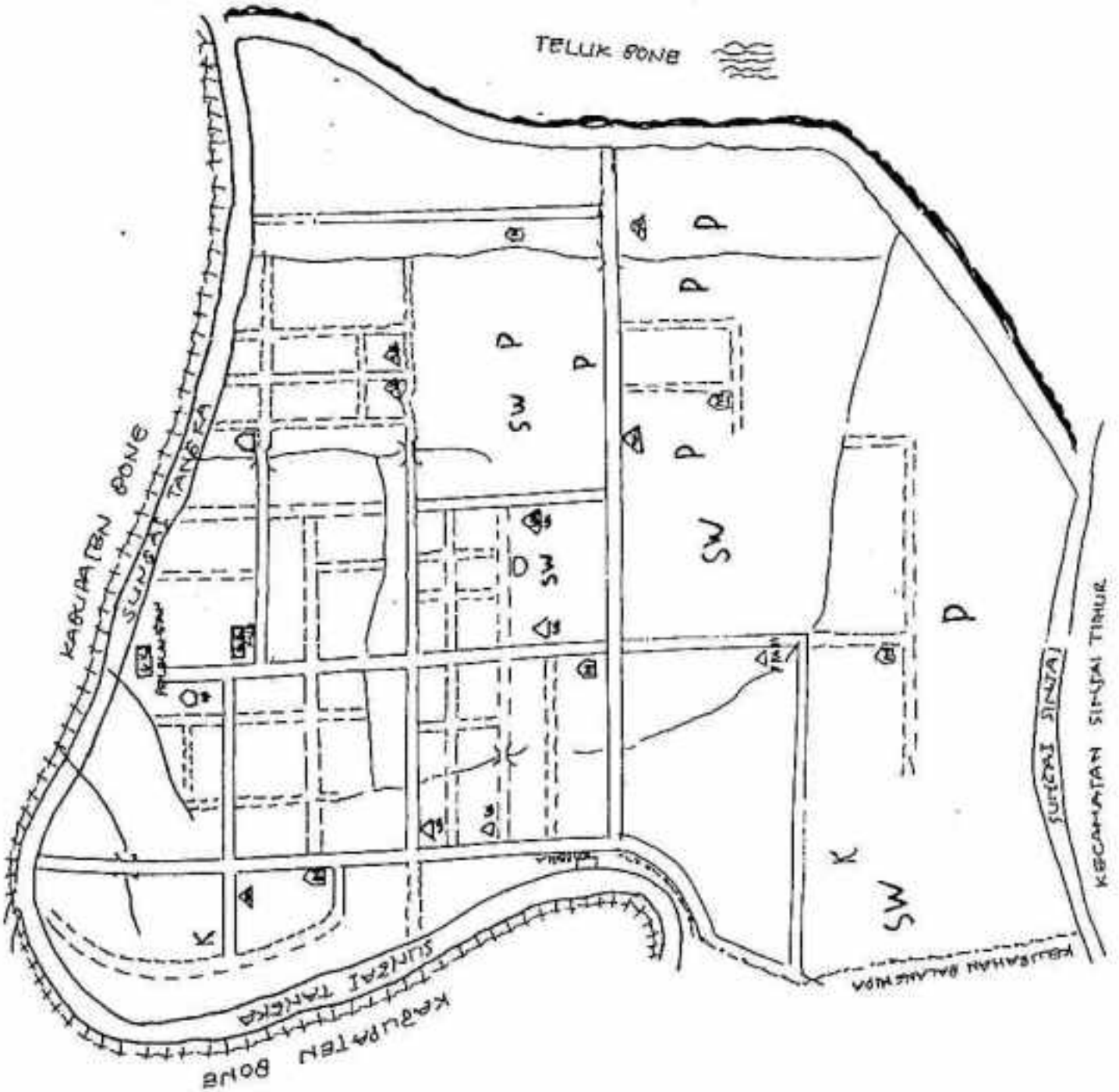
LAMPIRAN



SKALA 1 : 12.514

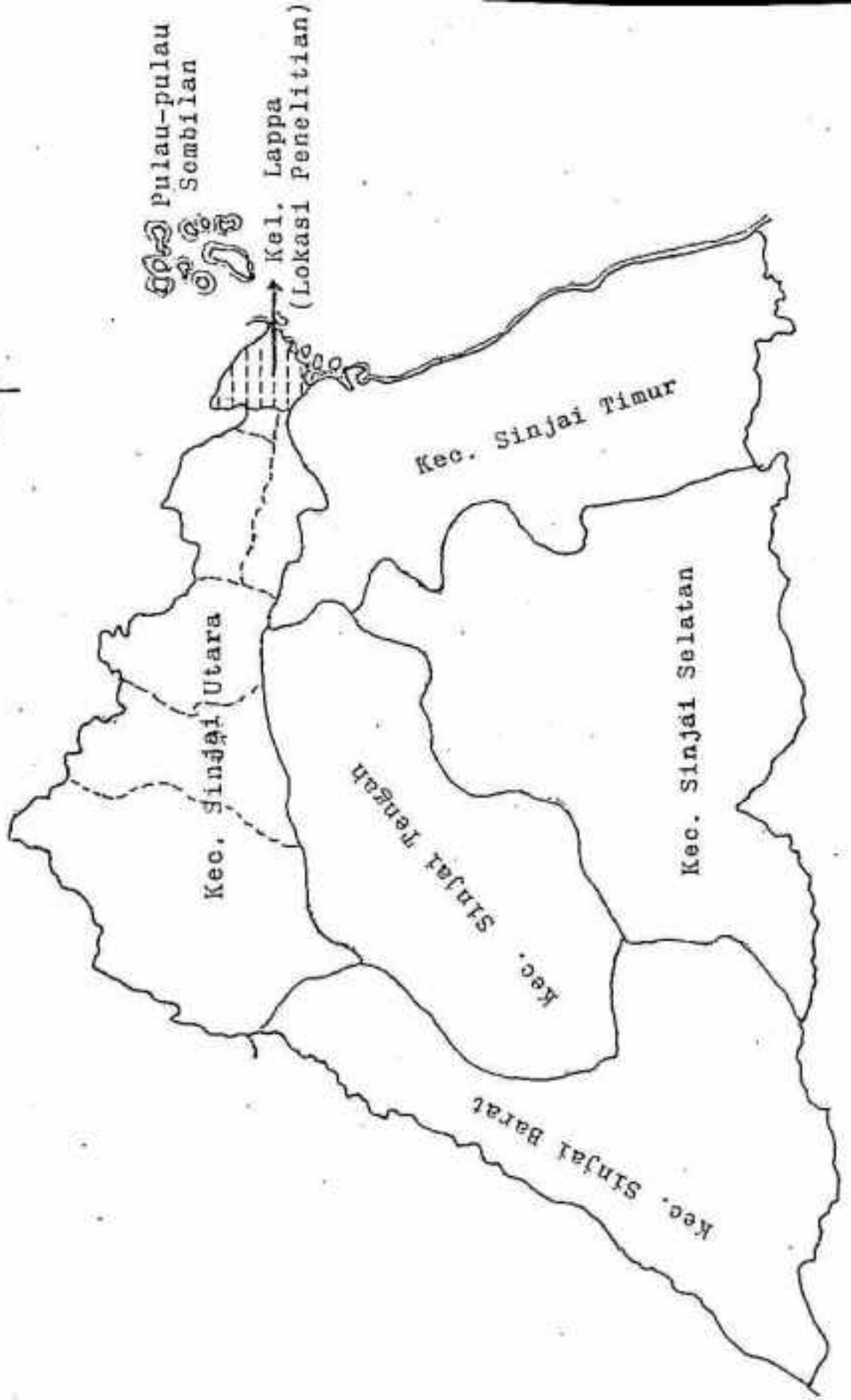
KETERANGAN

- +++++ : Batas Kecamatan
- : Batas Desa / Kota
- - - - : Jalur Air / Kanal
- - - - : Jalan Aspal / Lantai
- ==== : SUNGAI
- ===== : PASIRAN
- : JEMBATAN
- ===== : SAWAH
- ===== : LUBUK PERIKANAN / WADUK
- ===== : DAPUR
- ===== : SEKUNE BANTAR
- ===== : HUSUS / HANYA
- ===== : SEBUAH

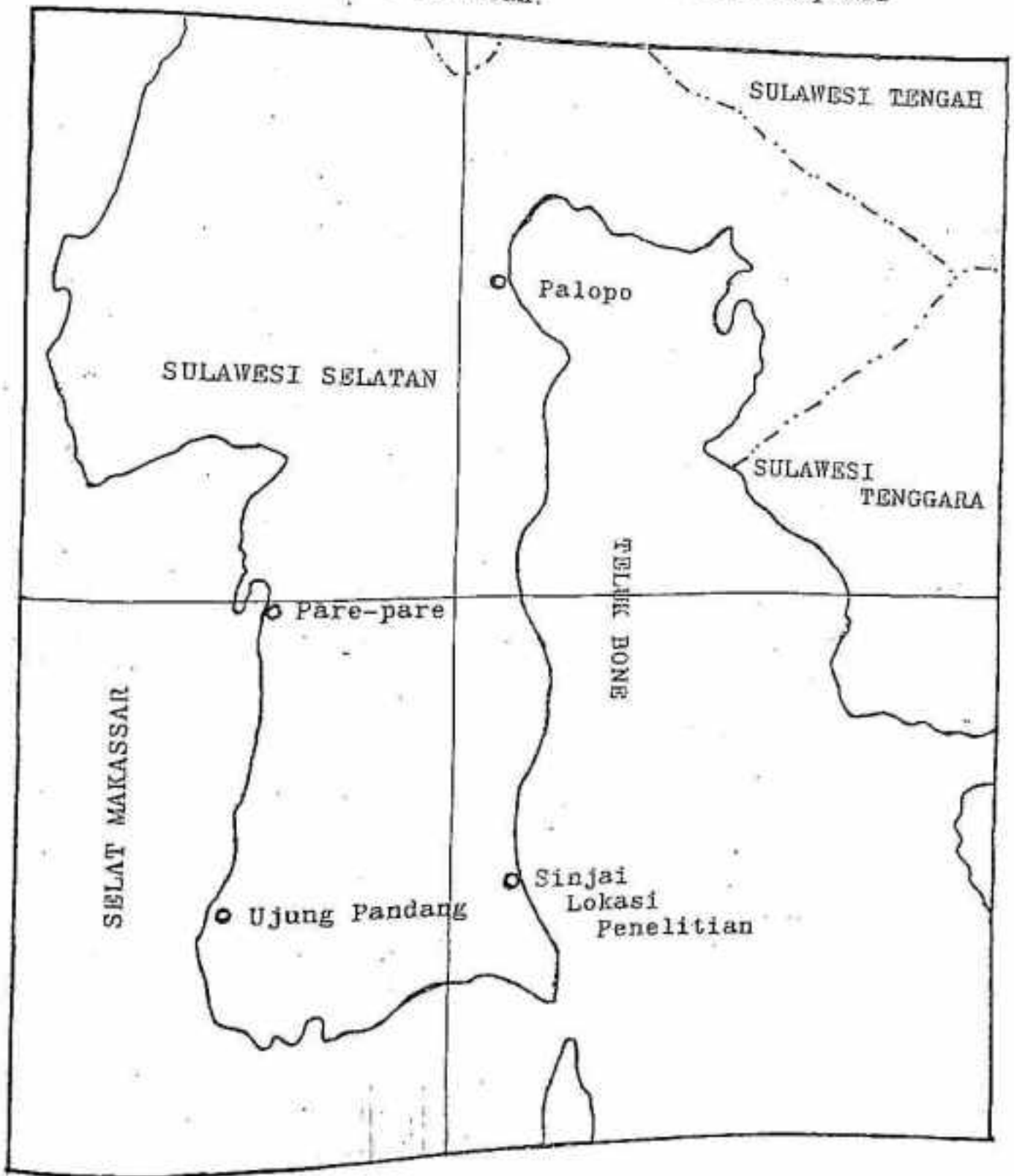


Lampiran 2. Peta Situasi Daerah Penelitian Kabupaten Singjai.

SKALA 1:225000



Lampiran 3. Peta Situasi Daerah Penelitian Propinsi Sulawesi Selatan.



Lampiran 4. Analisa Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Perahu Tanpa Motor dengan Alat Tangkap 'Lanra', 1991



Responden : 5 orang (unit)

1. Biaya Investasi :

- Perahu	: Rp. 60.000,-
- Alat Tangkap	: Rp. 50.000,-
- Keranjang/Baka	: Rp. 2.700,-
- Lain-lain	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 117.700,-

2. Biaya Eksploitasi : -

3. Penerimaan :

- Hasil tangkapan/hari : 1,5 keranjang
- Harga rata-rata/keranjang : Rp. 4.700,-
- Satu kali masa turo terdiri dari 18 hari operasi penangkapan.

- Dalam satu unit perahu terdiri dari 1 orang

Jadi penerimaan/turo adalah :

$$1,5 \times \text{Rp. } 4.700,- = \text{Rp. } 126.900,-$$

- Penerimaan dikurangi biaya-biaya adalah :

- Penerimaan/turo	: Rp. 126.900,-
dikurangi	
- Biaya penjualan	: Rp. 5.400,-
- Biaya perawatan	: Rp. 2.850,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 118.650,-

Jadi pendapatan yang diterima oleh nelayan pada usaha penangkapan ini adalah : Rp.118.650,-

dikurangi biaya penyusutan sebesar Rp.2.452,- adalah Rp.116.196,-

Jadi pendapatan bersih nelayan adalah Rp.116.196,-/turo.

Lampiran 5. Analisa Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan dengan Menggunakan Perahu Motor Tempel/ Ukuran Motor Kecil dengan Alat Tangkap Lanra

Responden : 5 orang (unit)

Rata-rata ukuran Motor : 8 PK

1. Biaya Investasi :

- perahu	: Rp. 1.035.000,-
- motor/mesin	: Rp. 620.000,-
- alat tangkap	: Rp. 627.000,-
- lampu	: Rp. 4.000,-
- keranjang	: Rp. 3.700,-
- tali pancing	: Rp. 600,-
- lain-lain	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
- Jumlah	: Rp. 2.295.300,-

2. Biaya Eksploitasi : Rp. 65.700,-

3. Penerimaan

- Nilai hasil tangkapan/hari : Rp. 13.700,-
- Dalam satu kali masa turo terdiri dari 18,9 hari operasi penangkapan ikan.
- Rata-rata penerimaan/turo adalah Rp. 258.930,-
- Penerimaan dikurangi biaya-biaya adalah :
 - Penerimaan/turo : Rp. 258.930,-
 - Biaya operasi : Rp. 65.700,-
 - Biaya penjualan : Rp. 7.920,-
 - Biaya perawatan : Rp. 2.930,-
 - Retribusi/pajak : Rp. 7.767,-
 - Jumlah : Rp. 174.613,-

- Pendapatan yang diterima oleh nelayan pada usaha penangkapan ikan ini adalah : Rp.174.613,-
- Pendapatan dikurangi penyusutan adalah :
 - pendapatan : Rp.174.613,-
 - penyusutan : Rp. 38.255,-

- Jumlah : Rp.136.358,-
- Jadi pendapatan bersih adalah Rp.136.358,-

Lampiran 6. Analisa Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Bagan Perahu dengan Memakai Motor

Responden : 3 orang (unit)

Rata-rata ukuran motor : 25,7 PK

1. Biaya investasi :

- Satu unit Bagan	: Rp.5.666.666,-
- Lampu	: Rp. 416.666,-
- Keranjang	: Rp. 17.500,-
- Motor	: Rp.5.333.333,-
- Perahu	: Rp.2.933.333,-
<hr/>	
- Jumlah	: Rp.14.367.498,-

2. Biaya eksploitasi Bagan/hari :

- Beras	: Rp. 2.000,-
- Kopi	: Rp. 1.500,-
- Gula	: Rp. 2.000,-
- Minyak tanah	: Rp. 3.000,-
- Lain-lain	: Rp. 1.500,-
<hr/>	
- Jumlah	: Rp.10.000,-

Biaya eksploitasi/operasi perahu motor/hari

adalah : Rp. 5.000,-

3. Penerimaan

- Rata-rata penerimaan/hari : 13,2 keranjang
- Nilai rata-rata hasil tangkapan/keranjang : Rp.7000,-
- Jadi penerimaan/hari : $13,2 \times \text{Rp.}7.000,- = \text{Rp.}92.400,-$
- Penerimaan/turo : $20 \times \text{Rp.}92.400 = \text{Rp.}1.848.000,-$
- Jadi penerimaan yang dibagikan antara pemilik unit

unit Bagan perahu dan unit perahu motor penjemput adalah nilai hasil kotor dikurangi dengan biaya komisi penjualan dan retribusi, yaitu :

- Penerimaan : Rp. 1.848.000,-
- Komisi penj.: Rp. 184.800,-
- Retribusi : Rp. 55.440,-

- Jumlah : Rp. 1.607.760,-

Jadi penerimaan inilah yang dibagikan sebesar Rp.1.607.760,

4. Sistim Bagi Hasil

- Pembagian antara pemilik Bagan perahu dengan "Pabbilolang" adalah :

- Penerimaan kotor : Rp. 1.607.760,-
- Bagian untuk 'pabbilolang' yaitu :
 $1/3 \times \text{Rp.}1.607.760,- = \text{Rp.} 535.920,-$

- Dipotong biaya eksploitasi dan biaya penyusutan :

Jadi penerimaan pabbilolang adalah :

- penerimaan : Rp. 535.920,-
- Biaya eksploitasi: Rp. 100.000,-
- Biaya penyusutan : Rp. 114.814,-

- Jumlah : Rp. 321.106,-

- Jadi pendapatan yang diterima adalah Rp. 321.106,-

- Untuk bagian Bagan perahu yaitu :

$2/3 \times \text{Rp.} 1.607.760,- = \text{Rp.} 1.071.840,-$

jumlah penerimaan ini dikurangi dengan biaya-biaya :

-

- Penerimaan Bagan perahu : Rp.1.071.840,-
- Biaya eksploitasi Bagan : Rp. 200.000,-
- Biaya perawatan : Rp. 15.000,-

- Jumlah : Rp. 856.840,-

- Jumlah penerimaan inilah yang dibagikan dengan perbandingan 1 : .1, yaitu :

- 50% untuk ponggawa/pemilik yaitu :

$$50/100 \times \text{Rp.}856.840,- = \text{Rp.}428.420,-$$

- 50% untuk penggarap dengan 6 orang sawi yaitu :

$$50/100 \times \text{Rp.}856.840,- = \text{Rp.}428.420,- \text{ dimana}$$

$$\text{Rp.}428.420,- : 6 = \text{Rp.}71.403,-$$

- Jadi pendapatan ponggawa/pemilik dikurang biaya penyusutan adalah : $\text{Rp.}428.420 - \text{Rp.}84.733 = \text{Rp.}343.687,-$

- Pendapatan persawi adalah $\text{Rp.}71.403,-$

Lampiran 7. Analisa Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Pancing Tonda dengan Memakai Motor.

Responden ; 2 orang (unit)

Rata-rata ukuran motor : 23 PK.

1. Biaya investasi :

- Mesin/motor	= Rp. 5.000.000,-
- Perahu	= Rp. 3.250.000,-
- Pancing	= Rp. 7.500,-
- Lampu	= Rp. 8.000,-
- Keranjang	= Rp. 5.500,-
- Tali pancing	= Rp. 3.000,-
- Tasi	= Rp. 500,-
- Lain-lian	= Rp. 5.000,-
<hr/>	
- Jumlah	= Rp. 8.274.500,-

2. Biaya operasi/eksploitasi perturo :

- Solar	= Rp. 108.000,-
- Es	= Rp. 60.000,-
- Oli	= Rp. 15.000,-
- Beras	= Rp. 7.500,-
- Kopi	= Rp. 3.000,-
- Gula	= Rp. 2.300,-
- Lain-lain	= Rp. 10.000,-
<hr/>	
- Jumlah	= Rp. 205.800,-

3. Penerimaan :

- Rata-rata hasil tangkapan/trip : 370 ekor.
- Nilai rata-rata ikan/ekor : Rp.1.500,-

- Dalam satu kali turo terdiri dari 3 kali trip
- Dalam satu kali trip terdiri dari 6 - 8 hari
- Dalam satu unit kapal/perahu terdiri dari 4 krew, yaitu satu orang juragan laut sekaligus sebagai pemilik dan tiga orang adalah sawi.

- Penerimaan perturo :

$370 \times \text{Rp.}1500,- \times 3 = \text{Rp.}1.665.000,-$ dikurangi biaya-biaya yaitu :

- Biaya operasi/turo	: Rp.617.000,-
- Biaya pemeliharaan	: Rp. 22.500,-
- Komisi penjualan (10%)	: Rp.166.500,-
- Retribusi TPI (3%)	: Rp. 49.950,-
<hr/>	
- Jumlah	: Rp.809.050,-

- Jadi penerimaan dari usaha penangkapan ikan ini adalah sebesar : Rp.809.050,-

4. Sistim Bagi Hasil

- Sistim Bagi Hasil pada usaha penangkapan ini adalah perbandingan 1 : 1

50% bagian untuk pemilik/juragan laut yaitu :

$50/100 \times 809.050,- = \text{Rp.}404.525,-$

- Pendapatan pemilik/juragan laut setelah dikurangi biaya penyusutan adalah

$\text{Rp.}404.525,- - \text{Rp.}144.923,- = \text{Rp.}289.603,-$

- Pendapatan sawi $50/100 \times 809.050 = \text{Rp.}404.525,-$

- Karena sawi ada 3 orang maka pendapatan persawi adalah $\text{Rp.}404.525 : 3 = \text{Rp.}134.841,-$

Lampiran 8. Analisa Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan 'Gae' dengan menggunakan perahu Motor.

Responden : 5 orang (unit)

Rata-rata ukuran motor : 23 PK.

1. Biaya investasi :

- perahu	= Rp. 3.300.000,-
- mesin/motor	= Rp. 5.260.000,-
- alat tangkap	= Rp. 5.380.000,-
- lampu	= Rp. 487.000,-
- keranjang	= Rp. 18.000,-
- lain-lain	= Rp. 40.000,-
<hr/>	
- jumlah	= Rp.14.455.000,-

2. Biaya eksploitasi/hari :

- solar	= Rp. 8.000,-
- oil	= Rp. 2.000,-
- minyak tanah	= Rp. 4.500,-
- kaos lampu	= Rp. 800,-
- spirtus	= Rp. 500,-
- korek api	= Rp. 200,-
- lain-lain	= Rp. 5.000,-
<hr/>	
- jumlah	= Rp.21.000,-

3. Penerimaan :

- Rata-rata hasil tangkapan/trip 14 keranjang
- Nilai rata-rata ikan/keranjang Rp.9.200,-
- Dalam satu kali masa turo terdiri dari 20 kali operasi penangkapan.

Jadi penerimaan/turo adalah

$$20 \times 14 \times \text{Rp. } 9.200,- = \text{Rp. } 2.576.000,-$$

- Nilai ikan perturo adalah : $\text{Rp. } 2.576.000,-$

- Penerimaan dikurangi biaya-biaya adalah :

- Penerimaan/turo = $\text{Rp. } 2.576.000,-$

- Biaya eksploitasi/turo = $\text{Rp. } 420.000,-$

- Biaya pemeliharaan alat = $\text{Rp. } 16.875,-$

- Komisi penjualan (10%) = $\text{Rp. } 257.600,-$

- Retribusi TPI (3%) = $\text{Rp. } 77.280,-$

- Jumlah = $\text{Rp. } 1.804.245,-$

- Jadi penerimaan yang diperoleh dari usaha penangkapan ini adalah $\text{Rp. } 1.804.245,-$

4. Sistim Bagi Hasil

Sistim bagi hasil pada usaha penangkapan ini adalah satu banding satu (50% : 50%)

- Jumlah sawi 12 orang

- Untuk bagian pemilik

$$50/100 \times \text{Rp. } 1.804.245 = \text{Rp. } 902.122,-$$

Jumlah pendapatan ini dikurangi dengan biaya penyusutan sebesar $\text{Rp. } 200.763$.

Jadi pendapatan pemilik/pongawa adalah $\text{Rp. } 701.359,-$

- Untuk bagian penggarap yaitu

$$50/100 \times \text{Rp. } 1.804.245 = \text{Rp. } 902.122,-$$

$$\text{Rp. } 902.122 : 12 = \text{Rp. } 75.176,-$$

Jadi pendapatan sawi pada usaha penangkapan ini adalah sebesar $\text{Rp. } 75.176,-$

Lampiran 9. Analisa Biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Pole and Line (Pancing Cakalang) dengan Menggunakan Perahu Motor, 1991.

Responden : 2 orang (unit)

Rata-rata ukuran motor : 33PK.

1. Biaya investasi :

- Kapal/perahu	= Rp. 10.000.000,-
- Mesin/motor	= Rp. 20.500.000,-
- Pancing	= Rp. 36.250,-
- Bambu	= Rp. 10.000,-
- Ember	= Rp. 7.750,-
- Tali pancing	= Rp. 5.000,-
- Lampu	= Rp. 6.000,-
- Tasi	= Rp. 750,-
- Lain-lain	= Rp. 5.000,-
<hr/>	
- Jumlah	= Rp. 30.570.750,-

2. Biaya eksploitasi/turo :

- Solar	= Rp. 1.000.000,-
- Olie	= Rp. 70.000,-
- Minyak tanah	= Rp. 30.000,-
- Biaya umpan	= Rp. 1.350.000,-
- Beras	= Rp. 50.000,-
- Kopi	= Rp. 30.000,-
- Lain-lain	= Rp. 10.000,-
<hr/>	
- Jumlah	= Rp. 2.560.000,-

3. Penerimaan

- Rata-rata hasil tangkapan/hari (trip) : 300 ekor.
- Harga rata-rata/ekor = Rp.1.300,-
- Dalam satu kali masa turo terdiri dari 20 kali operasi penangkapan ikan.
- Nilai ikan/hari : 300 ekor x Rp.1300,- = Rp.390.000,-
- Nilai ikan/turo : 20 x Rp.390.000,- = Rp.7.800.000,-
- Penerimaan dikurangi biaya-biaya, yaitu :
 - Penerimaan/turo = Rp.7.800.000,-
 - Biaya eksploitasi/turo = Rp.2.560.000,-
 - Biaya pemeliharaan alat = Rp. 75.000,-
 - Retribusi TPI (3%) = Rp. 234.000,-
 - Komisi penjualan (10%) = Rp. 780.000,-

- Jumlah = Rp.4.151.000,-
- Jadi penerimaan adalah Rp. 4.151.000,-

4. Sistim Bagi Hasil

- Sistim bagi hasil pada usaha penangkapan ini adalah perbandingan 1 : 1. 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik/pongawa.
- Bagian untuk pongawa
$$50/100 \times \text{Rp.}4.151.000,- = \text{Rp.}2.075.000,-$$
- Penerimaan untuk pongawa dikurangi biaya penusutan sebesar Rp.424.593,-
- Jadi pendapatan untuk pongawa adalah Rp.1.650.407,-
- Bagian untuk penggarap adalah
$$50/100 \times \text{Rp.}4.151.000,- = \text{Rp.}2.075.000,-$$
- Pendapatan untuk penggarap dibagi berdasarkan status

- dari pada penggarap, yang terdiri dari 13 orang.
- Untuk Kapten, Bas, Boy-boy mendapat 1,5 bagian
 - Untuk sawi mendapat 1 bagian
 - Pendapatan untuk kapten, bas, boy-boy adalah :
Rp. 214.706,-
 - Untuk bagian sawi adalah Rp. 143.137,-

Lampiran 10. Rataan Biaya, Penerimaan dan Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Ikan Menurut Perahu/Ukuran Motor Penggerak dan Alat Tangkap, dalam rupiah.

No.	Jenis Perahu/Ukuran Motor Penggerak	Jenis Alat Tangkap	Investasi	Dalam satu kali masa turo		Pendapatan status nelayan				
				Nilai Ikan Biaya	Penerimaan	Pemilik	J. Laut/Kapten	Bas	Boy-boy	Persawi
1.	Perahu Tanpa Motor	- Lanra'	117.700	8.250	118.650	-	-	-	-	-
2.	Perahu Motor Kecil	- Lanra'	2.295.300	84.317	174.317	174.613	-	-	-	-
3.	Perahu Motor Sedang (< 30 PK)	- Gas	14.455.000	771.755	1.804.245	902.122	150.424*	-	-	75.177
		- Bagan Perahu	14.367.498	375.160	855.840	428.420	85.684*	-	-	71.403
		- Pancing Tonda	8.274.500	855.950	809.050	404.525	80.905*	-	-	134.841
4.	Perahu Motor Besar	- Pole and Line (Subata)	30.570.750	7.800.000	4.151.000	2.075.500	214.705	214.705	314.706	143.137

Keterangan : * Apabila pemilik tidak ikut sebagai operator (jangan laut) maka bagian pendapatan untuk juragan laut diambil dari bagian pendapatan pemilik sebesar 20%.

Sumber : Data primer setelah diolah, 1991



Lampiran 11. Rekapitulasi Investasi, Biaya-biaya dan Penerimaan Usaha Penangkapan Ikan Dengan Memakai Perahu Motor.

No.	Nama	Umur/Pend.	Status	Jenis Motor	Ukuran Perahu	Alat Penangkapan	Mesin/Motor	Parahu	Investasi							
									Alat Tangkap	Lampu	Keranjang					
1.	Nawire	35	SD	M	-	Ya	23	10	3	1	Gae	3.500.000	3.000.000	4.000.000	490.000	22.500
2.	Sabanu	25	SD*	M	-	Ya	23	10	3	1	Gae	4.000.000	4.000.000	5.000.000	490.000	18.750
3.	Hidwan	40	SD*	M	-	Ya	23	10	3	1	Gae	4.000.000	3.500.000	4.000.000	450.000	15.000
4.	Bakri	32	SD	M	-	Ya	23	10	3	1	Gae	4.500.000	2.000.000	5.400.000	525.000	22.500
5.	H. Tajuddin	56	SLA	M	-	Ya	23	10	3	1	Gae	20.000.000	10.000.000	37.000	6.000	1.500
6.	H. A. Syah	54	SIP	P	-	Ya	33	10	3	1	P. Pakalangi	21.000.000	10.000.000	35.000	6.000	8.000
7.	H. Mustafa	37	SLA	P	-	Ya	33	10	3	1	P. tonda	5.000.000	3.500.000	6.000	8.000	5.000
8.	B. Rizki	35	SD	M	-	Ya	23	10	3	1	P. tonda	5.000.000	3.000.000	9.000	8.000	5.000
9.	S. A. I. N. S.	30	SD*	M	-	Ya	23	10	3	1	P. tonda	5.000.000	3.000.000	5.000.000	450.000	13.000
10.	Tajuddin	35	SD	M	-	Ya	27	10	3	1	B. parahu	6.000.000	3.000.000	6.000.000	450.000	15.000
11.	K. A. R. I. M.	31	SD	M	-	Ya	23	10	3	1	B. Parahu	5.000.000	2.800.000	6.000.000	350.000	22.500
12.	M. S. K. A.	45	SD*	M	Ya	-	5	15,5	0,5	0,5	Lanra	200.000	100.000	100.000	4.000	3.750
13.	M. S. M. A.	35	SD*	M	Ya	-	2	16,5	0,5	0,5	Lanra	100.000	75.000	125.000	4.000	3.750
14.	M. H. I. D. D. I. N.	45	SD	M	Ya	-	10	17,0	0,7	0,7	Lanra	800.000	2.500.000	125.000	4.000	4.000
15.	N. K. A. L. I.	40	SD	M	Ya	-	16	17,0	0,7	0,7	Lanra	1.500.000	1.000.000	127.000	4.000	3.000
16.	Kamaruddin	41	SD	M	Ya	-	7	14,0	0,8	0,8	Lanra	500.000	1.500.000	150.000	4.000	4.000
17.	K. U. S. T. A. D. I.	41	SD	M	Ya	-	7	14,0	0,8	0,8	Lanra	500.000	1.500.000	150.000	4.000	4.000

Sumber : Data primer setelah dilolah 1991.
 M : Pelilik alat/usaha penangkapan yang berangkat sebagai juragan laut.
 e) : Tidak lanjut SD.

Lanjutan lampiran II.

No. Tali Pancing	Investasi (b)			Biaya Operasi 1 x turo	Biaya Perawatan 1 x turo	Pajak Retribusi pertahun	Rata- hari Operasi
	Tesi	Dambu					
1.1	-	-	-	400.000	20.000	5.000	20x
2.1	-	-	-	400.000	22.500	5.000	20x
3.1	-	-	-	500.000	15.000	6.000	20x
4.1	-	-	-	400.000	10.000	5.000	20x
5.1	-	-	-	400.000	15.000	6.000	20x
6.1	5.000	750	10.000	12.500.000	75.000	204.000	20x
7.1	5.000	750	10.000	12.500.000	75.000	204.000	20x
8.1	3.000	500	-	500.000	35.000	1.500	20x
9.1	2.000	500	-	634.500	20.000	1.500	20x
10.1	-	-	-	200.000	15.000	5.000	20x
11.1	-	-	-	200.000	15.000	5.000	20x
12.1	-	-	-	200.000	15.000	5.000	20x
13.1	-	-	-	25.500	1.050	4.000	19x
14.1	-	-	-	30.000	1.500	4.000	20x
15.1	-	-	-	140.000	2.500	4.000	20x
16.1	-	-	-	50.000	5.000	4.000	20x
17.1	-	-	-	70.000	4.000	4.000	20x

Lampiran 12. Rekapitulasi Investasi dan Biaya-biaya pada Usaha Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Perahu Tak bermotor, 1991.

No.	Nama Responden	Umur	Pend.	Status	Ukuran Perahu		Alat Penangkapan	Investasi	Biaya Perawatan	Biaya Penjualan			
					P	L					T		
1.	D a k k a	50	SD*	M	14,0	10,6	0,6	Lanra	150.000	150.000	2.500	3.500	5.000
2.	S u f u	34	SD*	M	16,0	10,6	0,6	Lanra	165.000	145.000	3.030	3.000	5.500
3.	T a n a n g	51	SD*	M	14,0	10,6	0,6	Lanra	150.000	145.000	2.250	3.000	6.000
4.	D i d e	43	SD	M	14,0	10,6	0,6	Lanra	160.000	150.000	2.250	2.750	4.500
5.	R a m l i	47	SD*	M	14,0	10,6	0,6	Lanra	175.000	160.000	3.780	2.000	6.000

Sumber : Data primer setelah diolah, 1991
M : Pemilik yang mengoperasikan armada penangkapan.
*) : Tidak tamat SD.

Lampiran 13. Nama-nama Responden Sawi (Buruh nelayan)
dengan alat penangkapan yang diikuti, 1991

NO.	Nama Responden	Umur	Pend.	Jenis alat yang diikuti
1.	Jamaluddin	38	SD	P. Cakalang
2.	La Haling	51	SD*	Bagan Perahu
3.	A n r a	47	SD*	Gae
4.	T a j a n g	42	SD*	Gae
5.	Ambo Sakka	15	SLP	Pancing Cakalang
6.	Darwis	19	SLP	Pancing tonda
7.	Muh. Yunus	37	SD	Gae
8.	E n n a n g	18	SD*	Gae
9.	Tahir	30	SD	P. Cakalang
10.	Ramli	32	SD	P. tonda
11.	M a t a s a	42	SD*	Gae
12.	H i d d i n g	27	SD*	Bagan Perahu
13.	T a j u	23	SD*	Bagan Perahu
14.	Fiemansah	27	SLP	Bagan Perahu

±
Sumber : Data primer setelah diolah, 1991
*) ! Tidak tamat SD.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 11 Maret 1965 di Bikeru, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Orang tua bernama A. Hamid Parebbui dan A. Habibah Rasak. Pada tahun 1979 lulus SD Negeri No. 41 Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tahun 1982 lulus SMP Negeri Bikeru, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tahun 1985 lulus SMA Negeri 277 Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, pada tahun 1985 berhasil masuk di Fakultas Peternakan Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan, Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang.